



LKIP TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



Sukses Jakarta untuk Indonesia



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2023



JAKARTA BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2023 dapat disusun tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud tanggung jawab Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibuat secara periodik berisi informasi mengenai capaian kinerja instansi pemerintah atas rencana dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya secara transparan dan akuntabel, bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan maupun pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2023 tentang pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud, Laporan Kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan, dan akuntabel.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan, maupun bentuk kontribusi lainnya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat Jakarta Barat.

Jakarta, 31 Januari 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah yang dilimpahkan dari Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kedudukan, tugas dan fungsi, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 untuk menggambarkan serta mendorong transparansi capaian kinerja dan prestasi yang berhasil diraih Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat terhadap berbagai sasaran strategis sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya baik dalam Rencana Strategis, penetapan Indikator Kinerja Utama maupun Perjanjian Kinerja berikut permasalahan dan sejumlah hal yang masih memerlukan perbaikan.

Secara umum Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2023 telah menunjukkan kinerja yang baik. Beberapa penghargaan baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional berhasil diraih oleh perangkat daerah pada Kota Administrasi Jakarta Barat. Diirumuskan beberapa isu-isu strategis yang berkaitan dengan Kota Administrasi Jakarta Barat. Rumusan

isu-isu strategis dimaksud antara lain isu partisipasi masyarakat, isu ekonomi masyarakat, isu pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan, kebudayaan, dan olahraga, isu koordinasi perangkat daerah dan aktor-aktor pembangunan, isu peningkatan kualitas pelayanan, isu penataan dan pengembangan kawasan, isu penagihan kewajiban kepada pemilik SIPPT, dan isu belum cukup cepatnya waktu respon Camat dan Lurah saat terjadinya bencana/masalah sosial.

Tingkat capaian kinerja sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Barat mencapai 100 % pada setiap indikator kinerja sampai pada tahun 2023. Capaian kinerja sama sebesar 100 % apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya lebih disebabkan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara Kota Administrasi Jakarta Barat dengan tindak lanjut aduan masyarakat serta merealisasikan capaian kinerja sesuai waktu yang ditetapkan dan melakukan review capaian pada setiap triwulan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

Sekalipun capaian sasaran strategis, kegiatan strategis daerah, sasaran khusus dan sasaran operasional telah masuk dalam kategori memuaskan, namun demikian kerja keras dengan menerapkan nilai-nilai budaya kerja Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kesungguhan, komitmen, inovasi dan kreatifitas serta kapasitas dari seluruh pegawai termasuk koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat masih perlu ditingkatkan demi tercapainya keserasian dan keselarasan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	xii
Daftar Grafik	xiii
Bab 1 : Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Tujuan dan Manfaat	2
Dasar Hukum	2
Gambaran Umum Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat	4
Kedudukan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat.....	7
Tugas dan Fungsi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat	7
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat	13
Aspek Strategis Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat	18
Bab 2 : Perencanaan Kinerja Tahun 2023.....	23
Rencana Strategis.....	23
Pernyataan Visi.....	24
Indikator Kinerja Utama (IKU)	26
Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	29
Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja	37
Capaian Indikator Kinerja	39
Capaian Kegiatan Strategis Daerah.....	68
Capaian Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional	73
Analisis Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023.....	82
Perbandingan Capaian Kinerja	92
Realisasi Anggaran Tahun 2023	94

Prestasi dan Inovasi	101
----------------------------	-----

Bab 4 : Penutup	103
------------------------------	------------

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Prestasi dan Penghargaan
3. Inovasi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	5
Tabel 2 Persebaran Penduduk	6
Tabel 3 SKPD/UKPD Kota Administrasi Jakarta Barat	14
Tabel 4 Pegawai Kota Administrasi Jakarta Barat menurut jenjang jabatan dan unit kerja	16
Tabel 5 Kesesuaian Pendidikan, Diklatpim dan Pangkat Pejabat Struktural Kota Administrasi Jakarta Barat	17
Tabel 6 Target/Sasaran dan Indikator RPD terkait Tujuan Restra Tahun 2023-2026.....	26
Tabel 7 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2023-2026	27
Tabel 8 Keterkaitan Indikator Sasaran dengan Program dan Indikator Kinerja Program.....	28
Tabel 9 Target Kinerja Sasaran Strategis sesuai Lampiran Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023	30
Tabel 10 Target Kinerja KSD Kota Administrasi Jakarta Barat	31
Tabel 11 Target Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat	33
Tabel 12 Program dan Anggaran pada Lampiran Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023.....	35
Tabel 13 Interpretasi Kategori Nilai Capaian Kinerja	39
Tabel 14 Capaian Indikator Kinerja Utama	40
Tabel 15 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	41
Tabel 16 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan	

Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	42
Tabel 17 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi.....	43
Tabel 18 Capaian Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Program	44
Tabel 19 Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2023	46
Tabel 20 Interpretasi Capaian Kinerja Tahun 2023	48
Tabel 21 Jadwal Pelaksanaan SKM Tahun 2023.....	54
Tabel 22 Klasifikasi Nilai Persepsi	56
Tabel 23 Nilai SKM Pada Kecamatan Kota Adm Jakarta Barat Semester I Tahun 2023	57
Tabel 24 Nilai SKM Pada Kecamatan Kota Adm Jakarta Barat Semester II Tahun 2023.....	57
Tabel 25 Jadwal Pelaksanaan Survei Efektivitas Koordinasi Tahun 2023	63
Tabel 26 Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2023	64
Tabel 27 Capaian Indikator Kinerja KSD tahun 2023.....	69
Tabel 28 Perbandingan Target dan Realisasi KSD Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023	71
Tabel 29 Indikator Khusus Tahun 2023 Kota Adm Jakarta Barat	73
Tabel 30 Perbandingan Indikator Khusus Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023.....	77
Tabel 31 Indikator Operasional Tahun 2023 Kota Adm Jakarta Barat	79
Tabel 32 Perbandingan Indikator Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023.....	80
Tabel 33 Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023	83

Tabel 34 Tabel Analisis Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023.....	89
Tabel 35 Perhitungan Efisiensi Rincian Output (RO) dan Nilai Efisiensi.....	91
Tabel 36 Perbandingan Nilai IKM Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023	93
Tabel 37 Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Barat.....	94
Tabel 38 Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2019 - Tahun 2023.....	95
Tabel 39 Realisasi pelaksanaan anggaran pada PD/UKPD dengan kriteria pada Tahun 2023	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.....	4
Gambar 2 Bagan Susunan Organisasi	13

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	17
Grafik 2 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	46



BAB

1

Pendahuluan

Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan daerah saat ini lebih dituntut pada prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dengan mewujudkan *good governance* melalui peningkatan kinerja aparat negara akan menghasilkan kinerja pelayanan publik yang optimal. *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan *public goods and services* dengan praktek terbaik.

Agar *good governance* dapat diwujudkan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. *Good governance* menuntut koordinasi yang baik dan profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Instansi Pemerintah memiliki tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik/*stakeholders*) Jakarta Barat. Secara periodik pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan hasil atas kinerja yang telah dilaksanakannya selama satu tahun anggaran.

Tujuan dan Manfaat

Laporan Kinerja disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja diharapkan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 selain mengacu kepada peraturan perundang undangan baik dari tingkat pusat maupun tingkat provinsi, juga mengacu kepada Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

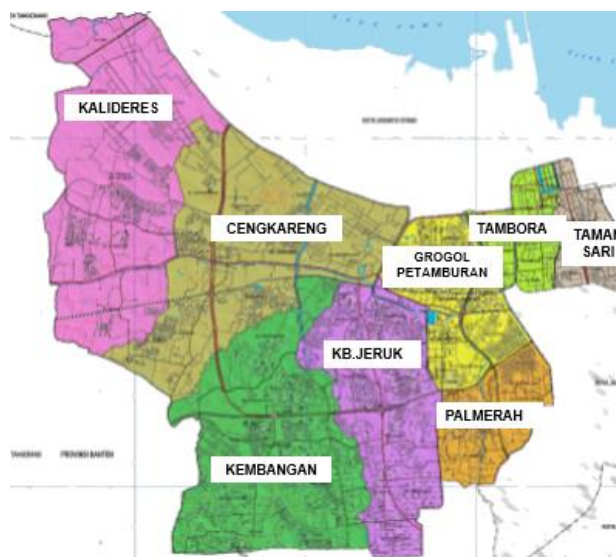
Gambaran Umum

Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat

Jakarta Barat terdiri dari 8 Kecamatan, 56 Kelurahan, 578 Rukun Warga, 6.348 Rukun Tetangga dengan penduduk 2.589.589 jiwa yang menempati areal seluas 12.615,44 ha.

Kepadatan penduduk rata-rata di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat adalah 19.993 jiwa/Km² yang tersebar secara tidak merata dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tambora dengan kepadatan sebesar 44.794 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kembangan dengan kepadatan penduduk sebesar 13.829 jiwa/km². Keadaan wilayah pada umumnya beriklim panas dengan suhu udara berkisar 23,0 sampai dengan 35,2 derajat Celcius.

Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut. Peta wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1
Peta Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

Persebaran Penduduk

Persebaran dan kepadatan penduduk di Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai data yang terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Barat Dalam Angka 2023 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk per Km2	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1	Kembangan	12.851	155.478	155.002	310.480
2	Kebon Jeruk	20.347	183.010	182.835	365.845
3	Palmerah	31.147	118.000	115.917	233.917
4	Grogol Petamburan	23.829	117.866	120.185	238.051
5	Tambora	49.841	136.513	132.626	269.139
6	Taman Sari	16.512	63.613	64.026	127.639
7	Cengkareng	22.031	295.819	288.892	584.711
8	Kalideres	15.210	232.249	227.558	459.807
	Jumlah	19.991	1.302.548	1.287.041	2.589.589

Sumber : Kota Jakarta Barat Dalam Angka 2023

Perekonomian

Sebagai Ibukota Negara RI dan pusat pemerintahan dan perekonomian, Jakarta sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian nasional. Selain itu, sebagai kota yang terbuka, perekonomian Kota Jakarta tidak terkecuali Kota Administrasi Jakarta Barat juga dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika perekonomian internasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat, laju pertumbuhan ekonomi mulai bangkit pada tahun 2022 sejak semakin teratasinya pandemi COVID-19. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi sebesar +5.52 persen.

Faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perekonomian Jakarta khususnya Jakarta Barat adalah jumlah penduduk, pengembangan infrastruktur kota yang meliputi penataan kawasan dan pemukiman, kebijakan pemerintah daerah, dan iklim ketentraman dan ketertiban yang kondusif yang sangat mempengaruhi iklim berusaha, kelancaran aktivitas ekonomi, dan kepariwisataan.

Sosial Budaya

Tantangan yang muncul di bidang sosial adalah pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mudah mengakses dan diakses masyarakat serta bertambahnya jumlah penduduk dan pengangguran. Adapun data jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Data Penduduk Menurut Agama

No	Kecamatan	Pemeluk Agama					
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Kembangan	247.102	31.206	24.058	634	7.419	61
2	Kebon Jeruk	291.821	33.898	25.085	464	14.410	167
3	Palmerah	208.616	13.924	8.057	557	2.732	31
4	Grogol Petamburan	136.267	38.121	26.579	305	36.584	195
5	Tambora	164.299	31.791	12.499	64	60.286	200
6	Taman Sari	75.284	20.722	10.636	76	20.887	34
7	Cengkareng	469.543	58.187	23.759	445	32.623	154
8	Kalideres	368.994	43.688	19.562	235	27.182	146
	Jumlah	1.961.926	271.537	150.235	2.780	202.123	988

Sumber : Kota Jakarta Barat Dalam Angka 2023

Kedudukan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat

Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan salah satu perangkat daerah yang ada pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kedudukan Kota Administrasi sebagai perangkat daerah diatur dalam Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Kota Administrasi berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
2. Walikota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat

Secara umum Kota Administrasi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi;

- b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kota Administrasi;
- j. Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;
- k. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- l. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kota Administrasi;
- m. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi

pimpinan daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;

- n. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;
- o. Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kota Administrasi;
- p. Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital Kota Administrasi;
- q. Pelaksanaan kesekretariatan Kota Administrasi
- r. Fasilitasi pengkoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
- s. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; dan
- t. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Kota Administrasi Jakarta Barat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.

Sebagaimana diatur dalam Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi struktural Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri dari :

- a. Sekretariat Kota, terdiri atas :
 1. Asisten Pemerintahan, terdiri atas :
 - a) Bagian Pemerintahan, terdiri atas
 - 1) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Bagian Hukum;
 - c) Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
 - a) Bagian Perekonomian; dan
 - b) Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup.
 3. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - 3) Subbagian Protokol.
 - b) Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Perbendaharaan.
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat.

- b. Kecamatan, terdiri atas :
 - 1. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - c) Subbagian Keuangan.
 - 2. Seksi Pemerintahan;
 - 3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - 4. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
 - 5. Kelurahan, terdiri atas :
 - a) Sekretariat Kelurahan;
 - b) Seksi Pemerintahan;
 - c) Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - d) Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

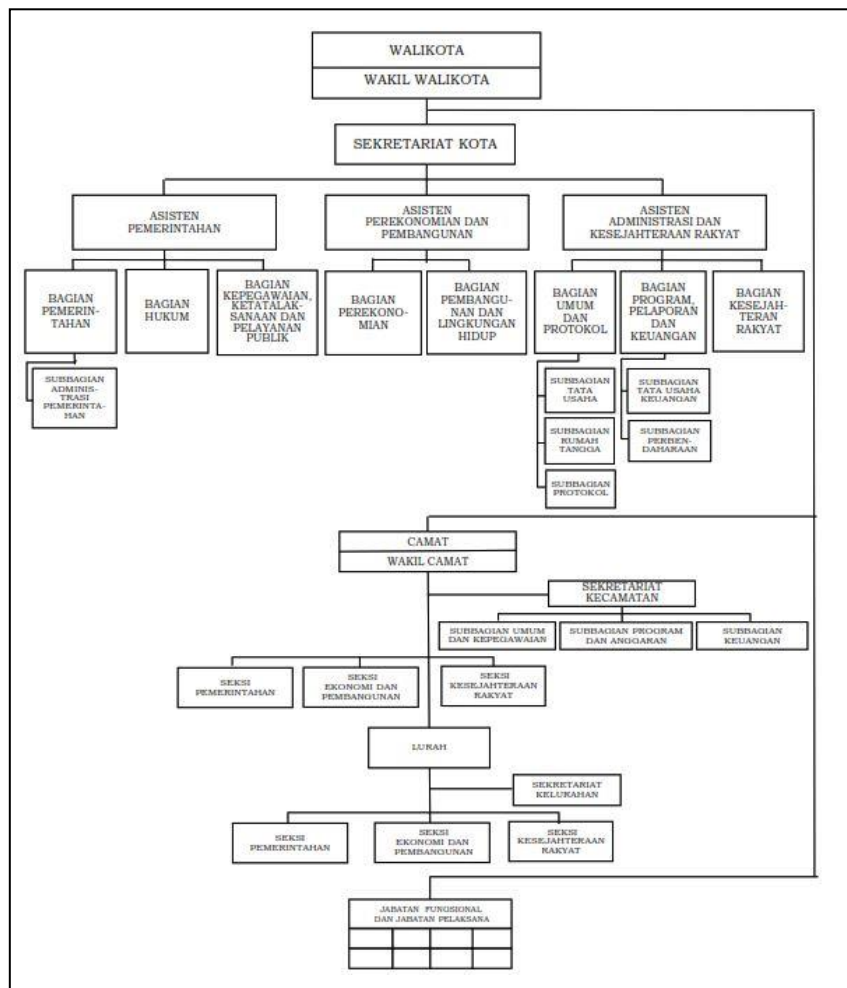
Pada Bagian di Sekretariat Kota Administrasi dibentuk Subkelompok, yaitu unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembedangannya, antara lain :

- a. Subkelompok Bina Pemerintahan;
- b. Subkelompok Tata Praja; dan
- c. Subkelompok Pelayanan Hukum;
- d. Subkelompok Bantuan Hukum;
- e. Subkelompok Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- f. Subkelompok Kepegawaian;
- g. Subkelompok Ketatalaksanaan;
- h. Subkelompok Pelayanan Publik;
- i. Subkelompok Pariwisata, Pangan, Kelautan, dan Pertanian;
- j. Subkelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- k. Subkelompok Perhubungan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi;
- l. Subkelompok Pekerjaan Umum;
- m. Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan;
- n. Subkelompok Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau;
- o. Subkelompok Program dan Pelaporan;
- p. Subkelompok Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan;
- q. Subkelompok Pendidikan, Kebudayaan, dan Mental Spiritual;
dan
- r. Subkelompok Kesehatan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat

Susunan organisasi tersebut dalam Lampiran XXXVII Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :



Gambar 2
Bagan Susunan Organisasi

Adapun UKPD di tingkat Kota Administrasi, yang berkaitan dengan fungsi Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh Kota Administrasi, terdiri atas :

- a. Inspektorat Pembantu Kota Administrasi;
- b. Suku Dinas;
- c. Suku Badan;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi; dan
- e. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi.

Tabel 3
SKPD/UKPD Kota Administrasi Jakarta Barat

NO	INSTANSI	PIMPINAN SKPD
1	Asisten Pemerintahan	Firmanudin
2	Asisten Administrasi dan Kesra	RM. Amien Haji
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Imron
4	Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat	Rano Rahmat Efendi
5	Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat	Hilmy Rosyida
6	Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat	Budiono Santoso
7	Bagian PLH Setko Adm. Jakarta Barat	Sefri Dwipayuda
8	Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat	Abdurrahman Anwar
9	Bagian Keuangan Setko Adm. Jakarta Barat	Saigor P. Gultom
10	Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Barat	Mera Nuringsih
11	Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat	Febbiandri Suharto
12	Inspektur Pembantu Wilayah Kota	Dzikran Kurniawan
13	Kepala Satpol PP Jakarta Barat	Agus Irwanto
14	Suku Badan Kesatuan Bangsa & Politik	M. Matsani
15	Suku Badan Kepegawaian Kota	Moh. Hafiz
16	Suku Badan Pendapatan Daerah	Rusdian Permana
17	Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota	Achmad Ichsan T
18	Suku Badan Pengelola Aset Daerah	Sigit Gunawan
19	Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah	Sigit Gunawan
20	Unit Pengelola Barang & Jasa	Aulia

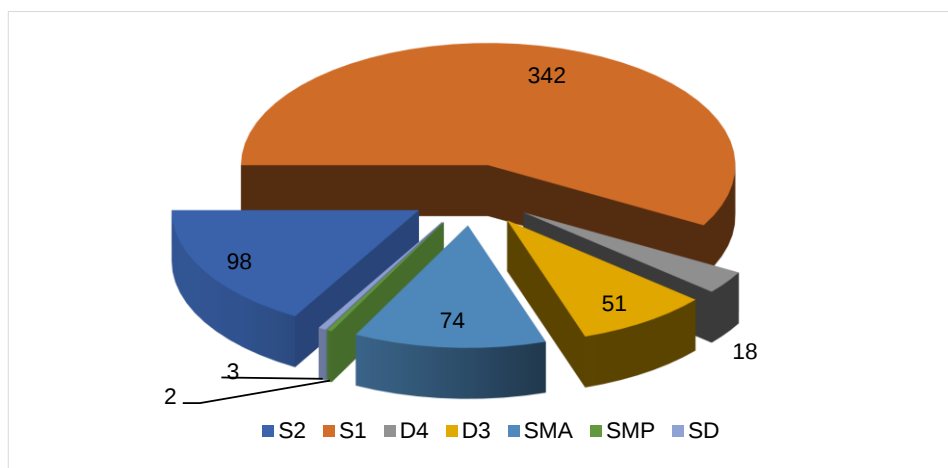
NO	INSTANSI	PIMPINAN SKPD
21	Suku Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	Gentina Arifin
22	Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adm. Jakarta Barat	Jon Vendri
23	Suku Dinas Kominfo, Informatika dan Statistik	Andrie Yuswanto
24	Suku Dinas Perhubungan	Muslim
25	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Jackson Dianrus S
26	Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Adm. Jakarta Barat	Dedi Sumardi
27	Suku Dinas Bina Marga	Darwin Ali
28	Suku Dinas Sumber Daya Air	Purwanti Suryandari
29	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Agus Ruhayat
30	Suku Dinas Lingkungan Hidup	Achmad Hariadi
31	Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang & Pertanahan	Heru Sunawan
32	Suku Dinas Sosial	Suprpto
33	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I	Junaedi
34	Suku Dinas Pendidikan Wilayah II	Junaedi
35	Suku Dinas Kesehatan	Erizon Safari
36	Suku Dinas Pemuda & Olah Raga	Eko Pudjihariyanto
37	Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Aswarni
38	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Romy Sidharta
39	Suku Dinas Perpustakaan & Arsip	Achmad Jazuri
40	Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Iqbal Idham Ramid
41	Suku Dinas Kebudayaan	Sri Kusumawati
42	Unit Pelaksana PMPTSP	Aziz Kurniawan Saputro

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kota Administrasi Jakarta Barat didukung oleh 589 pegawai yang tersebar ke dalam tingkat Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Komposisi pegawai berdasarkan jenjang jabatan dan unit kerja sebagai berikut :

Tabel 4
Pegawai Kota Administrasi Jakarta Barat
Menurut Jenjang Jabatan dan Unit Kerja

NO	JABATAN	SETKO	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH
1	Pimpinan Tinggi Pratama	3	0	0	3
2	Administrator	11	24	0	35
3	Pengawas	6	44	265	315
4	Subkelompok	18	0	0	18
5	Fungsional	2	0	0	2
6	Pelaksana	62	23	131	216
	TOTAL	102	91	396	589

Dalam rangka peningkatan kinerja, perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Administrasi Jakarta Barat terutama bagi para pegawai yang dipercaya untuk menduduki jabatan struktural. Penyesuaian tingkat pendidikan para pejabat struktural pada jenjang pengawas dan administrator telah dilakukan pengisian jabatan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara, di mana salah satu persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas adalah memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma 3. Kualifikasi pendidikan pegawai Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai data pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Grafik 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pejabat struktural tidak hanya dari segi pendidikan formal mengingat masih terdapat pejabat struktural yang belum memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5
Kesesuaian Pendidikan, Diklatpim dan Pangkat
Pejabat Struktural Kota Administrasi Jakarta Barat

NO	KELOMPOK JABATAN	JUMLAH JABATAN	KESESUAIAN		
			PENDIDIKAN	DIKLATPIM/ DIKLAT FUNGSIONAL	PANGKAT
1	PIMPINAN TINGGI PRATAMA	3	3	0	3
2	ADMINISTRATOR	35	35	25	35
3	PENGAWAS	315	299	109	315
4	SUBKELOMPOK	18	18	13	18
	TOTAL	371	355	147	371

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Barat, telaahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, dan dokumen perencanaan pembangunan nasional serta rencana tata ruang, telah dirumuskan beberapa isu-isu strategis yang berkaitan dengan Kota Administrasi Jakarta Barat. Rumusan isu-isu strategis dimaksud antara lain:

1. Isu partisipasi masyarakat.

Untuk menjaga dan memelihara kebersihan lingkungannya serta tanggap bencana, masyarakat harus diajak berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan maupun yang berkaitan kebencanaan.

2. Isu ekonomi masyarakat.

Selama dan pasca pandemi Covid-19, dampak melemahnya perekonomian telah dihadapi oleh seluruh elemen baik masyarakat maupun swasta. Oleh karena itu, dalam hal ini masih perlu diperluas peluang usaha dan kesempatan untuk bekerja serta bimbingan usaha masyarakat. Di sisi lain, transformasi ekonomi dengan pendekatan kolaborasi dan adaptif terhadap teknologi informasi serta pola hidup baru pasca pandemi Covid-19 perlu ditingkatkan.

3. Isu pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan, kebudayaan dan olahraga.

Untuk peningkatan perekonomian di Kota Administrasi Jakarta Barat, hal tersebut dapat dilakukan di antaranya melalui pendekatan pariwisata, kebudayaan dan olahraga. Akan tetapi, untuk memaksimalkan pendapatan tersebut berimplikasi kepada seluruh elemen masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan kepariwisataan budaya dan olahraga perlu ditingkatkan.

4. Isu pola koordinasi Perangkat Daerah dan Aktor-Aktor Pembangunan
Sebagai Kota Kolaborasi, pola koordinasi yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota..

Administrasi Jakarta Barat. Pada kondisinya saat ini, pola koordinasi tersebut cenderung masih menemukan beberapa kendala seperti kurang tanggapnya respon dari masing-masing aktor. Oleh karena itu, kedepannya, strategi-strategi kolaborasi yang cepat dan tepat perlu untuk ditingkatkan baik antar-Perangkat Daerah maupun dengan aktor non-pemerintah. Pada akhirnya, penggabungan sumber daya yang ada dari masing-masing aktor diharapkan akan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Barat.

5. Isu Peningkatan kualitas pelayanan.

Berdasarkan data kepuasan pelayanan, faktanya telah menandakan bahwa pelayanan di Kota Administrasi Jakarta Barat masih belum optimal. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemberdayaan, pengawasan, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat RT, RW, LMK, FKDM

dan lainnya, agar ke depannya masyarakat akan lebih dekat dengan pemerintah.

6. Isu penataan dan pengembangan kawasan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Perda tentang RT/RW 2030, Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan koridor-koridor pengembangan kawasan dan kewilayahan sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam konteks ini, sesuai dengan tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Barat bersama perangkatnya bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut bersama stakeholder terkait.

7. Isu penagihan kewajiban kepada pemilik SIPPT.

Hal ini terkait dengan kendala dalam penagihan kewajiban berupa fasos fasum sesuai dengan ketentuan dalam SIPPT. Salah satu kendala adalah diperlukan waktu yang cukup lama untuk proses penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai salah satu syarat mutlak dalam proses pemenuhan kewajiban fasos/fasum.

8. Isu belum cukup cepatnya waktu respon Camat dan Lurah saat terjadinya bencana/masalah sosial.

Hal ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pemanfaatan Rumah Dinas Camat dan Lurah sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan data yang ada, dari 8 Kecamatan dan 56 Kelurahan, terdapat 3 (tiga) Kecamatan dan 14 (empat belas) Kelurahan tidak memiliki rumah dinas. Sementara dari 47 (empat puluh tujuh) Rumah Dinas Camat dan Lurah yang ada, sebanyak 46 (empat puluh enam) Rumah Dinas tidak ditempati oleh Camat dan Lurah (98%). Hal ini terjadi karena Rumah Dinas Camat dan Lurah umumnya

dalam kondisi rusak berat maupun ringan yang disebabkan kondisi bangunan yang sudah tua. Rendahnya tingkat pemanfaatan Rumah Dinas oleh Camat dan Lurah dapat memengaruhi tingkat respon Camat dan Lurah dalam menangani permasalahan kewilayahan terutama di luar jam kedinasan.





BAB 2 Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Rencana Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat senantiasa mengacu pada visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Untuk mewujudkan visi Kota Jakarta khususnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2022 telah ditetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 yang antara lain berisi tujuan dan sasaran strategis yang akan ditempuh dalam kurun waktu empat tahun ke depan sekaligus sebagai panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Renstra tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pernyataan Visi

Sebagai pemberi arah dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu ditetapkan bersama suatu pandangan ke depan (*vision*) yang akan menjadi sumber motivasi dan inovasi dinamis dalam mewujudkan berbagai bentuk pelayanan publik yang prima. Gambaran ke depan yang dimaksud dirumuskan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran Kota Administrasi Jakarta Barat.

Visi Kota Administrasi Jakarta Barat adalah :

“Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Jasa yang nyaman dan Sejahtera”

Dalam rangka mewujudkan kondisi ideal tersebut, maka dirumuskan sebanyak 4 (empat) Misi sebagai hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai Visi Kota Administrasi Jakarta Barat, yaitu:

1. Membangun Tata Pemerintahan yang baik guna terwujudnya sebagai sebagai kota jasa dan wisata budaya dan bersejarah.
2. Meningkatkan Kualitas lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.
3. Memberdayakan Masyarakat dengan mengembangkan nilai, norma serta pranata sosial.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari visi dan misi tersebut adalah **” Meningkatkan Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal”** sehingga tujuan Kota Administrasi Jakarta Barat kurun waktu tahun 2023-2026 **”Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal”** dapat terwujud. Pada Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan penunjang dukungan pada pembangunan berkelanjutan pada periode pertama tahun 2023 sesuai dengan pernyataan visi dan misi Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan menyelaraskan pada rencana renstra 2023-2026 yang telah disepakati.

Tujuan kota Administrasi Jakarta Barat memiliki keterkaitan dengan Tujuan keempat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, yaitu Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas. Sasaran yang berkaitan dengan tujuan Renstra Jakarta Barat adalah sasaran pertama dari tujuan RPD tersebut, yaitu Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat. Tujuan dan Sasaran RPD beserta Indikator Kinerja terkait, sebagai berikut:

Tabel 6
Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja RPD terkait Tujuan Renstra
Tahun 2023-2026

No	Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
1	Transformasi Pelayanan Publik Dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokasi	Indeks	82	83	84	85
2	Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,50	88,60	88,70	90,00

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Administrasi Jakarta Barat akan diukur melalui terwujudnya atau tidaknya target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0043 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026.

Secara terperinci target kinerja Indikator Kinerja Utama Kota Administrasi Jakarta Barat yang akan dicapai pada setiap tahun antara tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Kota Adm. Jakarta Barat
Tahun 2023-2026

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja			
					2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal		Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	Nilai	86,75	87,30	87,85	89,50
1.1		Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kecamatan dan kelurahan	Nilai	88,50	88,60	88,70	88,80
			Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Nilai	85,00	86,00	87,00	88,50

Sasaran strategis Walikota Jakarta Barat merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dan dialokasikan dalam 4 (empat) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan berikut dengan indikator kinerja dari program dan kegiatan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Kinerja penyelenggaraan urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Barat yang mengemban urusan pemerintahan umum sesuai pembagian bidang

urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut dari tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama ke dalam program dan indikator kinerja program terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8
Keterkaitan Indikator Sasaran dengan Program dan Indikator Kinerja Program

Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
			2023	2024	2025	2026
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kecamatan dan kelurahan	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	51,30	57,89	61,74	66,09
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks	4 Indeks
Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	86	86	87	88,5
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	86	86	87	88,5
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	86	86	87	88,5

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan penugasan pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran, indikator dan target kinerja. Perjanjian kinerja merepresentasikan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Melalui penetapan perjanjian kinerja, peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur diharapkan dapat tercapai karena tersedia kejelasan ukuran penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan untuk melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah disusun dengan ketentuan menggunakan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Eselon II atau kondisi yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur dimaksud, telah dilakukan penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Barat antara Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 bertempat di Ruang Rapat Pola Bappeda Blok G Lantai 2 Balaikota. Dengan demikian, telah terdapat dokumen resmi yang berisi sasaran, indikator dan target kinerja yang menjadi tolok ukur

evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Barat, meliputi :

Tabel 9
Target Kinerja Sasaran Strategis
sesuai Lampiran Perjanjian Kinerja
Kota Administrasi Jakarta Barat
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86,75
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	88,5
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	85

Target kinerja pada sasaran strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdapat Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2023 dalam pelaksanaan sebagaimana tercantum, mewajibkan tercapainya target pada setiap triwulan. Adapun Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 10
Target Kinerja KSD
Kota Administrasi Jakarta Barat
Tahun 2023

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
Kegiatan Strategis Daerah 2023						
1	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2023	e-Monev KSD	100%	Persentase
2	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	100%	Persentase
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	100%	Persentase
4	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penataan RW kumuh sebagai pilot project Penataan Kawasan	e-Monev KSD	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	100%	Persentase

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
5	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyiapan Peremajaan Permukiman Kumuh melalui perbaikan rumah dan PSU	e-Monev KSD	100%	Persentase
6	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	100%	Persentase
7	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penyelesaian Trotoar Complete Street Di Provinsi DKI Jakarta	e-Monev KSD	100%	Persentase

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdapat pelaksanaan Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional dalam pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah yang mempengaruhi pada capaian Kinerja Perangkat Daerah dan penerimaan penghasilan bila tidak tercapai capaian target yang telah ditetapkan. Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 11
Target Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional
Kota Administrasi Jakarta Barat
Tahun 2023

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
Sasaran Khusus						
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	3	WTP
2	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	100%	Persentase
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	100%	Persentase
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	A (82)	Predikat
5	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	100%	Persentase
6	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	100%	Persentase
7	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	92%	Persentase
8	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	100%	Persentase

9	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	e-Kinerja	100%	Persentase
10	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	80%	Persentase
11	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per tahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	100%	Persentase
12	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	100%	Persentase
13	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	100%	Persentase
14	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	71%	Persentase
Sasaran Operasional						
No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
15	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	Persentase
16	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	Persentase
17	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	100%	Persentase

Target kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tersebut di atas, diwujudkan melalui penyelenggaraan beberapa program dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 12
Program dan Anggaran pada Lampiran Perjanjian Kinerja
Kota Administrasi Jakarta Barat
Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pengelolaan Kecamatan	496.043.506.357	APBD Provinsi DKI Jakarta
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	104.346.240.726	APBD Provinsi DKI Jakarta
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.972.558.746	APBD Provinsi DKI Jakarta
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	360.800.206.728	APBD Provinsi DKI Jakarta
5	Program Pengelolaan Kota Administrasi	2.385.199.557	APBD Provinsi DKI Jakarta





BAB

3

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat di dalam Bab 3 ini akan menyajikan akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian kinerja Indikator Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan uraian capaian masing-masing sarannya. Laporan ini akan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perbandingan kinerja yang (seharusnya) terjadi atau

realisasi dengan kinerja yang diharapkan atau target dilakukan dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Karakteristik komponen realisasi tersebut dibedakan menjadi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik; dan
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.

Mencermati Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Barat dimana seluruh target indikator kinerja memiliki karakteristik semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja maka dalam pengukuran capaian kinerja rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan penyimpulan capaian kinerja organisasi secara keseluruhan dan capaian masing-masing sasaran strategis. Capaian kinerja organisasi merupakan nilai rata-rata dari seluruh capaian sasaran strategis. Penyimpulan dilakukan dengan memberi interpretasi atau makna atas nilai rata-rata yang diperoleh. Makna dari nilai tersebut diambil dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, yang dapat digambarkan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 13
Interpretasi Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	Kode
1	AA	>85 – 100	Memuaskan	
2	A	> 75 – 85	Sangat Baik	
3	B	> 65 – 75	Baik	
4	CC	> 50 – 65	Cukup	
5	C	> 30 – 50	Kurang	
6	D	0 – 30	Sangat kurang	

Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Utama

Sebagai alat untuk mengukur kinerja yang hasilnya dapat dipergunakan untuk melihat aspek-aspek yang harus diperbaiki dalam rangka peningkatan kinerja berikut akuntabilitasnya, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Terwujud atau tidaknya dampak yang diharapkan tercermin pencapaian target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0043 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023-2026.

Hasil pengukuran untuk tahun 2023 yang merupakan tahun pertama periode Rencana Strategis 2023-2026 atas pencapaian target indikator kinerja utama Kota Administrasi Jakarta Barat serta perbandingannya dengan target akhir yang diharapkan, menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 14
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86,75	92,33	106,43
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	88,5	94,91	107,24
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	85	89,76	105,59

Berdasarkan tabel tersebut, nilai Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi pada tahun 2023 mencapai angka 92,33 telah memberi kontribusi yang sangat baik bagi pencapaian target Rencana Strategis 2023-2026 karena telah berhasil mencapai 106,43 % dari target kinerja yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode Rencana Strategis. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan telah berhasil mencapai 107,24 % serta Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi telah berhasil mencapai 105,59 % dari target kinerja.

Perbandingan realisasi, target dan capaian indikator kinerja utama pada tahun 2023 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2022	N/A	N/A	N/A
2	2023	86,75	92,33	106,43%

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi pertama kali menjadi target di tahun 2023. Realisasi sebesar 92,97 melampaui target sebesar 87. Realisasi capaian indikator kinerja ini 107,17%

Tabel 16
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan
di Kecamatan dan Kelurahan

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2020	86	88,01	102,34%
2	2021	88	90,62	102,98%
3	2022	88,5	93,59	105,75%
4	2023	88,5	94,91	107,24%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan senantiasa berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat telah puas dengan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat terutama kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).

Tabel 17
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2022	N/A	N/A	N/A
2	2023	85,0	89,76	105,60%

Indikator kinerja Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi pertama kali menjadi target di tahun 2023. Target sebesar 85 berhasil terlampaui dengan realisasi sebesar sebesar 90,28. Realisasi capaian indikator kinerja ini mencapai 106,21%. Dari hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota Administrasi Jakarta Barat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat berjalan dengan optimal.

Realisasi indikator kinerja utama diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat dan efektivitas koordinasi kota administrasi, berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat telah puas dengan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat terutama kecamatan dan kelurahan.

Beberapa faktor penunjang yang memungkinkan tercapainya target indikator kinerja utama, antara lain :

1. Dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilaksanakan aparat kecamatan dan kelurahan.

2. Kinerja yang baik dari para Camat dan Lurah beserta seluruh jajarannya dalam memberikan layanan kemasyarakatan.
3. Koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit/instansi terkait.
4. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan survei yang memberi kemudahan bagi responden.

Upaya mewujudkan sasaran strategis pada Tahun 2023 dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program. Target, realisasi dan capaian dari masing-masing indikator kinerja program dengan sumber data pada pengolahan Akuntabilitas Pemerintah dimaksud dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 18
Capaian Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Program

Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kecamatan dan kelurahan	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4	4	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4	4	100%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan Ruang Interaksi Warga	4	4	100%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4	4	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	51,3	56,76	110,6%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4 Indeks	4 Indeks	100%

Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan	85	84,62	99,55%
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	85	93,16	109,6%
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	85	91,49	107,6%

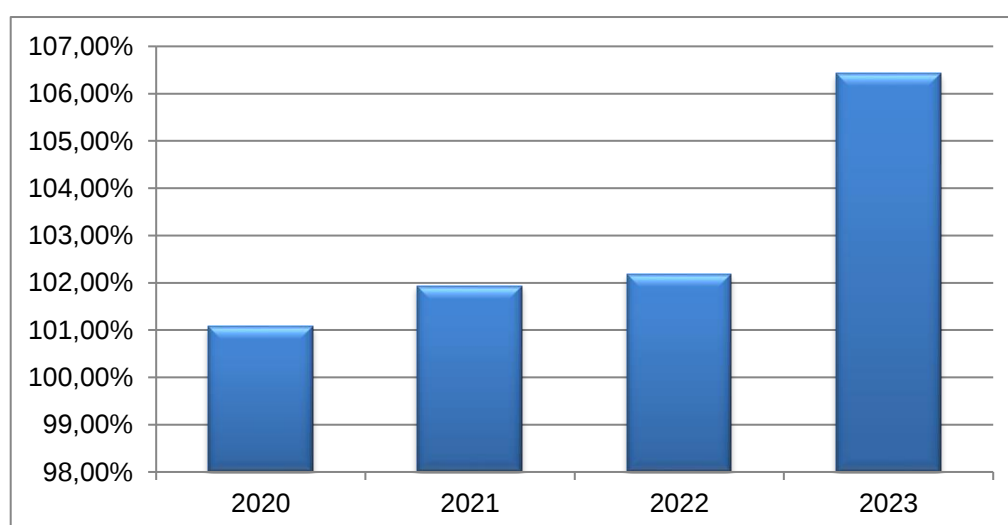
Perbandingan capaian indikator kinerja program tidak dapat dilakukan antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Hal ini dikarenakan tahun 2023 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Barat 2023-2026 sehingga perbedaan program dan indikator kinerja program.

Pada tahun pertama dari periode Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Barat 2023-2026, pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, telah terlaksana dengan cukup baik. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat pada akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja
Tahun 2023

Tahun 2020						
No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	86,75	Nilai	92,33	106,43%
		Capaian Sasaran Strategis	106,43%			
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	88,5	Nilai	94,91	107,24%
		Capaian Sasaran Strategis	107,24%			
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	85	Indeks	89,76	105,59%
		Capaian Sasaran Strategis	105,59%			
Capaian Kinerja Kota Administrasi						106,42%

Perkembangan capaian Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat di lihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik 2
Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dari tabel hasil pengukuran dan grafik perbandingan capaian tersebut di atas, dapat dilihat bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir realisasi Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat senantiasa harapan berada diatas 100%. Grafik capaian Perjanjian Kinerja menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil evaluasi, kenaikan dikarenakan capaian perjanjian kinerja yang melebihi target. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kota Administrasi Jakarta Barat” berkontribusi paling besar pada capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yaitu sebesar 107,24%.

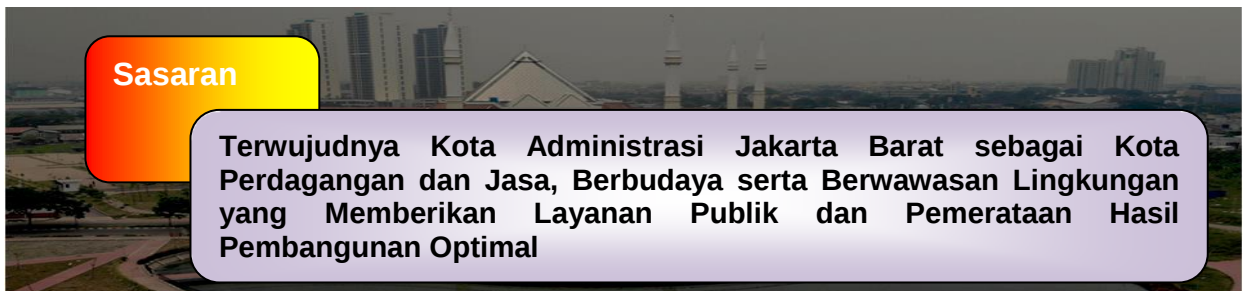
Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perhitungan capaian indikator kinerja tersebut diinterpretasikan sebagai berikut:

Tabel 20
Interpretasi Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Capaian	Realisasi		
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	106,43%	AA	Memuaskan	
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	107,24%	AA	Memuaskan	
		105,59%	AA	Memuaskan	
	Capaian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat	106,42%	AA	Memuaskan	

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan nilai capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2023 adalah sebesar 106,42%. Dengan nilai tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2023 untuk mewujudkan target, sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 antara Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, telah terselenggara dengan baik dan menunjukkan kinerja yang termasuk dalam kategori AA atau memuaskan.

Seluruh sasaran strategis berhasil melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat dari masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai berikut:



Sasaran

Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal

Pemerintahan akan sangat terbantu kinerjanya apabila tata kelola pemerintahan merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dimensi dari good governance yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek akuntansi adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam tatakelola pemerintahan memiliki arti sejauhmana pemerintahan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar. Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi keuangan serta laporan pertanggungjawaban. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Sementara akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja suatu organisasi. Dengan demikian transparan dan akuntabel dapat dimaknai sebagai kemampuan pejabat publik untuk menjawab secara terbuka segala pertanyaan dari masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka.

Untuk mengukur kinerja aparatur di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat (*stakeholders*) perihal kebutuhan dan harapan, maka atas dasar Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Surat Keputusan Walikota Nomor e-0004 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023, diselenggarakanlah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Kepuasan Masyarakat adalah Pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka disebut Indeks Kepuasan Masyarakat, angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Unsur survei kepuasan masyarakat merupakan faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM sangat berguna untuk memahami kebutuhan pengguna layanan dan sebagai tolok ukur kinerja pelayanan publik. Panduan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Keberhasilan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas selalu menjadi tantangan bagi institusi pelayanan baik publik maupun swasta. Institusi pelayanan dituntut menjadi organisasi yang handal dimana seluruh elemen penggerak di dalam organisasi diberikan kebebasan untuk berdiskusi dan menjalankan standar yang menjadi kesepakatan sehingga konsistensi dalam proses pelayanan tetap terjaga. Implementasi dari pelayanan yang dijalankan tersebut haruslah dipantau dan dievaluasi secara sistematis dan teratur.

Survei Kepuasan Masyarakat selain dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan, juga memungkinkan perbaikan pelayanan selain itu menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Melalui analisis kinerja dapat disusun prioritas perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan di Walikota Jakarta Barat pengukuran yang berkesinambungan akan memungkinkan untuk mengetahui kinerja pelayanan masing-masing Kelurahan dan Kecamatan serta untuk memperoleh unsur pelayanan mana yang dianggap penting oleh masyarakat yang menjadi prioritas

untuk diperbaiki kualitasnya dan adanya Indeks Kepuasan Masyarakat di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Walikota. Melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat maka untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, Pemerintah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan Tahun 2023.

Adapun sasaran pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kota Administrasi Jakarta Barat adalah mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong penyelenggara pelayanan publik menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik, dan mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan pengisian survei melalui link yang disebarakan kepada para pengguna 7 (tujuh) jenis layanan. 7 (tujuh) jenis layanan, antara lain :

1. Pelayanan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU);
2. Pelayanan Keamanan dan Ketertiban;
3. Pelayanan Juru Pemantau Jentik (Jumantik);
4. Pelayanan PKK;
5. Pelayanan RPTRA;

6. Pelayanan Posyandu;
7. RT, RW, LMK, dan FKDM.

Jumlah minimal responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode adalah 100 orang tiap layanan. Responden harus memberikan penilaian terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan, antara lain :

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana.

Survei Kepuasan Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta

Barat Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu :

1. Semester I (27 Maret – 28 April 2023)
2. Semester II (13 September – 10 Oktober 2023)

Tabel 21
Jadwal Pelaksanaan SKM
Tahun 2023

Kegiatan	Bulan										
	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Persiapan dan perencanaan SKM Semester I 2023											
Pelaksanaan SKM Semester I 2023											
Pengolahan data/analisis data SKM Semester I 2023 oleh Diskominfotik											
Penyerahan hasil analis data SKM Semester I 2023 oleh Diskominfotik											
Pengolahan data/ analisis data oleh Bagian KKPP Jakarta Barat											
Penyampaian hasil SKM Semester I 2023 ke tingkat Provinsi											
Pelaksanaan SKM Semester II 2023											
Pengolahan data/analisis data SKM Semester II 2023 oleh Diskominfotik											
Penyerahan hasil analis data SKM Semester II 2023 oleh Diskominfotik											
Penyusunan Laporan SKM Semester II 2023 oleh Bagian KKPP Jakarta Barat											
Penyampaian hasil SKM Semester II 2023 ke tingkat Provinsi											

Data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan data untuk mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM didapatkan dari nilai rata-rata tertimbang masing masing 9 unsur pelayanan tersebut. Dalam Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat, Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus :

$$\text{Nilai Rata2 Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot 1}}{\text{Jumlah Unsur 9}} = \dots = 0,11$$

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai IKM dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Berdasarkan petunjuk dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan memperhitungkan total nilai persepsi untuk setiap unsur pelayanan, Total nilai persepsi diperoleh dengan mengalikan frekuensi responden yang memberikan jawaban untuk setiap skala penilaian. Misalnya untuk dimensi kinerja, nilai 1 diberikan untuk penilaian Sangat Tidak Setuju (STS), nilai 2 Tidak Setuju (TS), nilai 3 (Setuju) dan nilai 4 (Sangat Setuju). Selanjutnya jawaban dikonversikan dengan nilai dasar 25 digunakan untuk mendapatkan rentang penilaian antara 25 – 100 sehingga diperoleh nilai IKM. Nilai IKM kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori A (Sangat Baik), B (Baik), C (Kurang Baik) dan D (Tidak Baik) sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 22
Klasifikasi Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25.00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65.00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Untuk menentukan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Barat dihitung dengan memperhitungkan total nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh Kecamatan dibagi jumlah Kecamatan, maka IKM Kota Administrasi Jakarta Barat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$IKM \text{ Kota Adm. Jakarta Barat} = \frac{\text{Total IKM Kecamatan}}{\text{Jumlah Kecamatan}}$$

Kota Administrasi Jakarta Barat telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada Semester I (27 Maret – 28 April 2023) dan Semester II (13 September – 10 Oktober 2023) Tahun 2023 dengan jenis survei sesuai dengan indikator. Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat didapatkan dari nilai rata-rata IKM pelayanan masing-masing Kecamatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 23
Nilai SKM Pada Kecamatan Kota Adm Jakarta Barat
Semester I Tahun 2023

No.	KECAMATAN	NILAI IKM							
		JUMANTIK	TIBUM	PKK	POSYANDU	PPSU	RPTRA	RT/RW/ LMK/FKDM	IKM
1	Cengkareng	95,80	96,41	95,95	95,90	95,25	95,41	96,26	95,85
2	Grogol Petamburan	96,07	96,65	96,57	96,41	96,14	96,83	96,26	96,42
3	Kalideres	92,36	92,68	93,01	93,11	93,64	94,30	92,96	93,15
4	Kebon Jeruk	94,26	95,74	95,01	94,90	96,56	93,91	95,20	95,08
5	Kembangan	93,96	94,54	94,42	94,28	94,26	94,58	94,24	94,33
6	Palmerah	91,21	91,49	91,19	91,67	91,45	90,08	91,90	91,28
7	Tamansari	92,61	94,22	93,43	93,36	93,76	87,08	93,16	92,52
8	Tambora	93,05	93,24	93,21	93,48	92,96	93,54	93,43	93,27
IKM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		93,67	94,37	94,10	94,14	94,25	93,22	94,18	94,15

Tabel 24
Nilai SKM Pada Kecamatan Kota Adm Jakarta Barat
Semester II Tahun 2023

No.	KECAMATAN	NILAI IKM							
		JUMANTIK	TIBUM	PKK	POSYANDU	PPSU	RPTRA	RT/RW/ LMK/FKDM	IKM
1	Cengkareng	95,80	96,41	95,95	95,90	95,25	95,41	96,26	95,32
2	Grogol Petamburan	96,07	96,65	96,57	96,41	96,14	96,83	96,26	95,93
3	Kalideres	92,36	92,68	93,01	93,11	93,64	94,30	92,96	95,01
4	Kebon Jeruk	94,26	95,74	95,01	94,90	96,56	93,91	95,20	95,63
5	Kembangan	93,96	94,54	94,42	94,28	94,26	94,58	94,24	95,69
6	Palmerah	91,21	91,49	91,19	91,67	91,45	90,08	91,90	95,37
7	Tamansari	92,61	94,22	93,43	93,36	93,76	87,08	93,16	92,07
8	Tambora	93,05	93,24	93,21	93,48	92,96	93,54	93,43	97,79
IKM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		95,07	95,97	95,81	95,78	95,27	95,97	95,72	95,66

$$\begin{aligned}
 \text{IKM Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2023} &= \frac{\text{IKM I} + \text{IKM II}}{2} \\
 &= \frac{94,15 + 95,66}{2} = 94,91
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Administrasi Jakarta Barat Pada Tahun 2023 adalah 94,91 (SANGAT BAIK). Dari pengolahan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan di seluruh Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara total responden menilai pelayanan yang diterima di Kota Administrasi Jakarta Barat sudah berada dalam kategori Sangat Baik dengan nilai IKM sebesar 94,91. Hal tersebut dikarenakan hampir semua nilai IKM di Kecamatan berada di atas batas minimal nilai IKM.
2. Masih adanya beberapa Kecamatan dan Kelurahan yang memerlukan perbaikan dan pembinaan terhadap tingkat kepuasan masyarakat pada unsur-unsur pelayanan yang masih rendah.

Untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi kembali penggunaan Aplikasi pada jaksurvei.jakarta.go.id dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan kinerja serta kemampuan para pengelola dalam memberikan pelayanan.

Dari hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan pengolahan data/angka Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan pada Tahun 2023, diperoleh angka Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar 94,91. Angka Indeks tersebut melebihi target yang telah ditetapkan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 88,5. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat tersebut baik untuk masing-masing bidang pelayanan maupun nilai total kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dan kelurahan, antara lain :

1. Dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilaksanakan aparat kecamatan dan kelurahan.
2. Kinerja yang baik dari para Camat dan Lurah beserta seluruh jajarannya dalam memberikan layanan kemasyarakatan.
3. Koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit/instansi terkait.
4. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan survei yang memberi kemudahan bagi responden.

Di samping adanya faktor pendorong tersebut, dari hasil evaluasi diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam upaya mengejar target Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, yaitu :

1. Perubahan dan pergeseran anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang berjalan namun tidak menggunakan anggaran.

Peningkatan angka realisasi dan capaian kinerja dari sasaran strategis Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal, menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat telah puas dengan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat. Angka Indeks pada tahun 2023 tersebut melebihi target yang telah ditetapkan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu sebesar 86,75 dan termasuk dalam kategori A (Sangat Baik).

2. Survei Indeks Efektivitas Koordinasi

Selain Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), untuk mengetahui kinerja pelayanan, perlu dilaksanakan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi. Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan pengukuran terhadap Efektivitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya. Hasil pengukuran terhadap efektivitas pelaksanaan koordinasi Kota Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden para Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.

Keberhasilan untuk meningkatkan kinerja koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan yang optimal selalu menjadi tantangan bagi institusi pelayanan publik. Institusi pelayanan publik dituntut menjadi organisasi yang handal di mana seluruh elemen penggerak di dalam organisasi. Implementasi dari Standar Prosedur Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan haruslah dipantau dan dievaluasi secara sistematis dan teratur.

Adapun sasaran pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat adalah mendorong Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat dan Pejabat di bawah koordinasinya menjadi lebih inovatif dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan melalui koordinasi yang efektif dan efisien.

Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan dengan pengisian survei melalui link yang dikirimkan langsung kepada para Kepala UKPD di Kota Administrasi Jakarta Barat selaku responden. Responden harus memberikan penilaian terhadap 9 (Sembilan) indikator pelayanan, antara lain :

1. Persyaratan, variabelnya adalah mudah ketika ingin berkoordinasi, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur, variabelnya adalah Mudah dikontak atau ditemui, tidak berbelit-belit saat koordinasi.

3. Waktu, variabelnya adalah Cepat, efisien, dan efektif dalam merespons, tepatnya selama proses koordinasi hingga selesai.
4. Biaya, variabelnya adalah tidak ada biaya-biaya yang dibebankan selama proses koordinasi.
5. Produk pelayanan, variabelnya adalah tepat dalam merespons segala sesuatu selama proses koordinasi dan Mengingatkan setiap pihak untuk memiliki pemahaman yang sama terkait suatu informasi yang telah disepakati bersama
6. Kompetensi pelaksana, variabelnya adalah mampu menjembatani rantai informasi antar pihak dan memastikan setiap informasi tersampaikan, mampu memproses informasi yang masuk dan memberikan umpan balik yang relevan, mampu meluruskan informasi ketika ada satu pihak yang mengaburkannya
7. Perilaku pelaksana, variabelnya adalah sigap mendukung dan membantu setiap pihak yang membutuhkan informasi tambahan/penjelas selama proses koordinasi, menghindari situasi/informasi yang simpang siur selama proses koordinasi
8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, variabelnya adalah menginisiasi rapat koordinasi atau hal-hal lain yang diperlukan sebagai tindak lanjut koordinasi
9. Sarana dan prasarana, variabelnya adalah menyediakan forum komunikasi yang aktif digunakan selama proses koordinasi.

Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta

Barat Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu :

1. Semester I (25 Mei – 9 Juni 2023)
2. Semester II (21 November – 4 Desember 2023)

Tabel 25
Jadwal Pelaksanaan Survei Efektivitas Koordinasi
Tahun 2023

Kegiatan	Bulan									
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Pemutakhiran kuesioner, menginput kuesioner ke Jaksurvei, dan kerangka analisis Survei Semester I										
Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Semester I 2023										
Pengolahan data/analisis data Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Semester I 2023 oleh Diskominfo										
Penyajian Data Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Semester I 2023 oleh Diskominfo										
Penyusunan Laporan SKM Semester I 2023 oleh Bagian KKPP Jakarta Barat										
Penyampaian hasil SKM Semester I 2023 ke tingkat Provinsi										
Pemutakhiran kuesioner, menginput kuesioner ke Jaksurvei, dan kerangka analisis Survei Semester I										
Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Semester II 2023										
Pengolahan data/analisis data Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Semester II 2023 oleh Diskominfo										
Penyajian Data Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Semester II 2023 oleh Diskominfo										
Penyampaian hasil Survei Indeks Efektivitas Koordinasi Semester II 2023 ke tingkat Provinsi										

Analisis Indeks Efektivitas Koordinasi Asisten Sekretaris Kota

Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023 menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Rata2 Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot 1}}{\text{Jumlah Unsur 9}} = \frac{0,99}{9} = 0,11$$

Selanjutnya untuk mendapatkan nilai Indeks Efektivitas Koordinasi (IEK) dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$IEK = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Kota Administrasi Jakarta Barat telah melaksanakan Survei Indeks Efektivitas Koordinasi pada Semester I (25 Mei – 9 Juni 2023) dan Semester II (21 November – 4 Desember 2023) Tahun 2023. Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Barat didapatkan dari nilai rata-rata Indeks Efektivitas Koordinasi masing-masing Asisten sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 26
Nilai Indeks Efektivitas Koordinasi Tahun 2023

	Kota Administrasi Jakarta Barat	Asisten Administrasi dan Kesra	Asisten Pemerintahan	Asisten Perekonomian & Pembangunan
Semester I	89,23	87,84	84,32	95,54
Semester II	90,28	95,14	84,92	90,78
Tahun 2023	89,76	91,49	84,62	93,16
Predikat Mutu	A (SANGAT BAIK)	A (SANGAT BAIK)	B (BAIK)	A (SANGAT BAIK)

Berdasarkan perhitungan di atas, Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Barat Pada Tahun 2023 adalah 89,76 (SANGAT BAIK). Dari pengolahan hasil survei Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara total responden menilai efektivitas koordinasi para asisten di Kota Administrasi Jakarta Barat sudah berada dalam kategori Sangat

Baik dengan nilai IKM sebesar 89,76.

2. Indeks efektivitas Tahun 2023 dari masing-masing Asisten Sekretaris Kota Wilayah Jakarta Barat adalah 91,49 (Mutu A) untuk Asisten Sekretaris Bidang Administrasi dan Kesejahteraan, 84,62 (Mutu B) untuk Asisten Sekretaris Bidang Pemerintahan, dan 93,16 (Mutu A) untuk Asisten Sekretaris Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk meningkatkan Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pertemuan rutin UKPD di bawah koordinasi para asisten secara berkala sehingga memudahkan koordinasi pelaksanaan program kerja dan pemecahan masalah yang terjadi lintas UKPD serta tingkatkan peran asistensi kepada UKPD.
2. Peningkatan efektivitas berbagai rapat koordinasi antara UKPD yang kegiatannya saling bersinggungan sehingga tercapai output yang maksimal dari kegiatan.

Dari hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan pengolahan data/angka Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi Jakarta barat yang dilaksanakan pada Tahun 2023, diperoleh angka Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar 89,76. Angka Indeks tersebut melebihi target yang telah ditetapkan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 85. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong peningkatan nilai Indeks Efektivitas Koordinasi, antara lain:

1. Dukungan para kepala UKPD dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilaksanakan Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Kinerja yang baik dari pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Barat UKPD di wilayahnya efektif dan efisien, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.
3. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan survei yang memberi kemudahan bagi responden.

Di samping adanya faktor pendorong tersebut, dari hasil evaluasi diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam upaya mengejar target Indeks Efektivitas Koordinasi Kota Administrasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, yaitu :

1. Perubahan dan pergeseran anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang anggaran berjalan namun tidak menggunakan anggaran.
2. Terjadinya pemulihan ekonomi dari situasi pandemi Covid-19.

Peningkatan angka realisasi dan capaian kinerja dari sasaran strategis Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal, menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat telah puas dengan pelayanan kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kota Administrasi Jakarta

Barat. Angka Indeks pada tahun 2023 tersebut melebihi target yang telah ditetapkan di tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu sebesar 86,75 dan termasuk dalam kategori A (Sangat Baik).

3. Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi

Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi diperoleh dengan perhitungan rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi

Keberhasilan untuk meningkatkan kinerja koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan yang optimal dan memberikan pelayanan yang berkualitas selalu menjadi tantangan bagi institusi pelayanan publik. Institusi pelayanan publik dituntut menjadi organisasi yang handal di mana seluruh elemen penggerak di dalam organisasi. Implementasi dari Standar Prosedur Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan haruslah dipantau dan dilakukan evaluasi secara sistematis dan teratur.

Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan yang optimal.

Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi diperoleh dengan perhitungan rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap

layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan hasil indeks kepuasan koordinasi kota administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi. Perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl} \text{Indeks Kepuasan} & & \text{Indeks Kepuasan Masyarakat} \\ \text{Layanan Administrasi} & = & + \\ & & \text{Indeks Efektivitas Koordinasi kota} \\ & & \hline & & \text{Jumlah Indeks} \\ & & 94,91 + 89,76 \\ & & \hline & & 2 \\ & & = 92,33 \end{array}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, Indeks Layanan Kepuasan Kota Administrasi Jakarta Barat adalah 92,33. Nilai tersebut termasuk dalam kriteria mutu “Sangat Baik”.

Capaian Kegiatan Strategis Daerah

1. Capaian Kegiatan Strategis Daerah 2023

Sebagai dukungan pelaksanaan perjanjian kinerja pada Kegiatan Strategis Daerah tahun 2023 terdapat pelaksanaan sebanyak 4 Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang tercapai dengan realisasi pelaksanaan Rencana Aksi pada setiap triwulan pada B03, B06, B09, dan B12. Terdapat 25 Rencana Aksi yang terbagi sebanyak 4 Renaksi pada target B03, 7 Renaksi pada target B06, 7 Renaksi pada target B09, dan 7 Renaksi pada target B012. Keberhasilan pencapaian realisasi Kegiatan Strategis Daerah tercermin dari terwujud atau tidaknya dampak yang

diharapkan dari pelaksanaan rencana aksi dengan kolaborasi dan penataan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat.

Hasil pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah untuk tahun 2023 yang merupakan pencapaian seluruh bagian UKPD dan unsur teknis atas pencapaian Kota Administrasi Jakarta Barat serta perbandingannya dengan target akhir yang diharapkan, menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 27
Capaian Indikator Kinerja
KSD tahun 2023

NO	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
Kegiatan Strategis Daerah 2023						
1	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B06, B09, dan B12
NO	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Keterangan
2	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B06,B09, dan B12
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B09 dan B12

4	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B03,B06,B09 dan B12
5	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B06 dan B12
6	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B03,B06,B09, dan B12
7	Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkap	e-Monev KSD	100%	Terealisasi pada B06

Kegiatan Strategis Daerah selain dimaksudkan untuk mendukung tingkat pembangunan dan rencana kinerja Tahun 2023, dilakukan berkelanjutan dan mencapai target sasaran yang perlu ditambah menjadi bagian dari Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023. Dari hasil pelaksanaan KSD Tahun 2022 melalui sistem monitoring ksd.jakarta.go.id dengan pengolahan data maka capaian pelaksanaan Renaksi seluruh KSD terealisasi dengan baik dengan capaian Persentase 100 % pada Tahun 2023. Persentase tersebut memenuhi target yang telah ditetapkan untuk Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan Capaian 100%. Secara terperinci dibandingkan dengan capaian setiap tahun maka pecapaian dapat digambarkan pada tabel :

Tabel 28
Perbandingan Target dan Realisasi KSD
Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023

No	Tahun	Renaksi	Target	Realisasi	Capaian
1	2018	3	100	100	100,00%
2	2019	15	100	100	100,00%
3	2020	37	100	100	100,00%
4	2021	45	100	100	100,00%
5	2022	24	100	100	100,00%
6	2023	25	100	100	100,00%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, realisasi KSD setiap tahunnya terealisasi dengan baik dan memuaskan serta senantiasa berhasil mencapai target yang telah ditetapkan melalui penambahan jumlah

renaksi setiap tahunnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kota Administrasi Jakarta Barat mendukung dan mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah dengan menyelesaikan target Kegiatan Strategis Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang menjadi dukungan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 dengan capaian angka 100 %, antara lain :

1. Kolaboratif unsur Kota Administrasi Jakarta Barat dalam melakukan dukungan, penyelesaian hambatan, dan memberikan rencana jangka pendek, menengah dan panjang dalam mewujudkan capaian KSD Tahun 2023.
2. Apresiasi dan dukungan *stakeholder* dalam pelaksanaan penataan wilayah dan pemukiman dengan melakukan diskusi bersama dan mengutamakan kepentingan bersama sehingga pelaksanaan berjalan tepat waktu.
3. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala pada setiap triwulan capaian KSD Tahun 2023 yang terdapat hambatan dan memberikan laporan capaian secara berkala pada pimpinan.

Hal ini menunjukkan bahwa jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan target kinerja Kegiatan Strategis Daerah yang ditetapkan dengan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Capaian Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional

1. Capaian Sasaran Khusus

Sebagai dukungan pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2023 pada Kepala Perangkat Daerah terdapat Indikator Khusus tersusun pada Sasaran Khusus tahun 2023. Indikator khusus menjadi bagian dari Pengolahan e-kinerja dalam capaian penerimaan TPP pada Kepala Perangkat Daerah. Adapun capaian dan realisasi indikator Khusus Tahun 2023 pada Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai berikut :

Tabel 29
Indikator Khusus Tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	3 (WTP)	3 (WTP)	Pernyataan profesional BPK RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta mendapat opini WTP=3(100%)
2	Meningkatnya Pemanfaatan E- Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	100%	100%	Pengadaan Makan dan Minum di Sekretariat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Kota Adm. Jakarta Barat sudah 100% menggunakan e-Order. Dengan transaksi e-Order sebesar Rp.11.714.039.621,-

3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	100%	100%	Paparan Strategi Komunikasi, Editorial Plan, mitigasi krisis dan bahasa komunikasi diinput ke dalam sistem Strakom dan materi program unggulan yang dipublikasikan melalui berbagai media.
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	A (82)	83,45	Kota Administrasi Jakarta Barat memperoleh nilai 83,45 dengan predikat A.
5	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	100%	100%	Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember telah tersusun
6	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu	e-Kinerja	100%	100%	Daftar data sesuai Kepgub Nomor 186 Tahun 2023 tentang Daftar Data Provinsi DKI Jakarta telah diinput pada portal satu data Indonesia dengan capaian 100%
7	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja	92%	96,97%	Hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat Tahun 2023 telah melebihi target
8	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	100%	100%	Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 mencapai target

9	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	Persentase penyelesaian penginputan data konsolidasi hasil kewajiban fasos fasum dari pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	e-Kinerja	100%	100%	115 BAST (Berita Acara Serah Terima) Tahun 2017-2022 telah diinput sesuai target.
10	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	80%	96,82%	Realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri telah melebihi target
11	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	100%	100%	Seluruh PNS Kota Administrasi Jakarta Barat telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran
12	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	100%	100%	7 video terkait telah diunggah pada website <i>Knowledge Management</i> BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
13	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	100%	100%	Seluruh target dan dokumen terkait Manajemen Risiko telah mencapai target
14	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	71%	96,90%	Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi Kota Administrasi Jakarta Barat telah melebihi target.

Capaian Sasaran Khusus Tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan kesepakatan perjanjian kinerja. Pada pelaksanaan indikator pemanfaatan e-order dan pemanfaatan Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercapai 100 %. Capaian ini merupakan dukungan dan Kerjasama perangkat daerah pada Kota Administrasi Jakarta Barat termasuk Kelurahan dan Kecamatan dalam memastikan terinformasi program unggulan tersampaikan dengan baik. Pada capaian laporan opini keuangan daerah telah terealisasi predikat WTP telah tercapai 100% pada Triwulan II pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada indikator Predikat SAKIP Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2022 sebagai indikator keberhasilan Nilai/Predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan capaian nilai SAKIP 91,66. Pelaksanaan hasil dituangkan dalam Keputusan Gubernur menjadikan nilai Predikat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan predikat AA.

Adapun pelaksanaan indikator khusus mencapai Persentase pemenuhan target yang telah ditetapkan untuk Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan Capaian rata-rata 100 %. Secara terperinci dibandingkan dengan capaian setiap tahun dapat digambarkan pada :

Tabel 30
Perbandingan Indikator Khusus
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023

No	Indikator Khusus	2021	2022	2023	Capaian	Keterangan
1	Opini laporan Keuangan	100%	100%	100%	100,00%	Tercapai
2	e-Order	100%	100%	100%	100,00%	Tercapai
3	Strategi Komunikasi	100%	100%	100%	100,00%	Tercapai
4	Predikat SAKIP	93,85	91,66	83,45	100,73%	Tercapai
5	Arsip Aktif	-	-	100%	100,00%	Tercapai
6	SDI	-	-	100%	100,00%	Tercapai
7	SKLM	-	-	96,97%	100,00%	Tercapai
8	BMD	-	-	100%	100,00%	Tercapai
9	BAST	-	-	100%	100,00%	Tercapai
10	TKDN	-	-	96,82%	100,00%	Tercapai
11	Kompetensi ASN	-	-	100%	100,00%	Tercapai
12	Manajemen Pengetahuan	-	-	100%	100,00%	Tercapai
13	Manajemen Risiko	-	-	100%	100,00%	Tercapai
14	Target Kinerja Anggaran	-	-	96,90%	100,00%	Tercapai
15	Nilai PMPRB	0	98,64	-	-	-i
16	e-Office	0	100%	-	-	-
17	e-Perbal	2021	2022	-	-	-

Capaian sasaran khusus ini merupakan kinerja bersama dalam memberikan capaian realisasi yang baik pada masyarakat dan komitmen melakukan perubahan dalam mendukung Program Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil evaluasi tabel dan capaian, terdapat beberapa hal yang menjadi dukungan pada sasaran khusus Tahun 2023, antara lain:

1. Pelaksanaan pemanfaatan e-order dapat mudah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab mendukung transparansi, kemudahan, dan pemanfaatan UMKM.
2. Implementasi Strategi Komunikasi Publik yang disusun secara berkala tersosialisasi dengan baik dengan pemenuhan kebutuhan tepat

sasaran pada setiap Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Dukungan penggunaan e-SAKIP dalam perencanaan, penggunaan dan implementasi pada seluruh pejabat pengampu dengan melakukan perencanaan, realisasi tepat waktu dan mencapai target dengan baik.
4. Dukungan seluruh Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat dalam pengelolaan arsip aktif.
5. Dukungan seluruh Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat dalam menyediakan data terkait dengan Satu Data Indonesia,.
6. Kota Administrasi Jakarta Barat termasuk Kelurahan dan Kecamatan dalam memastikan inventarisasi BMD berubah gedung dan bangunan berjalan dengan optimal.
7. Akuntabilitas pelaksanaan opini keuangan dapat secara akuntabel mempertahankan WTP selama 6 Tahun berturut-turut.
8. Dukungan dari seluruh pegawai Kota Administrasi Jakarta Barat dalam pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran per tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan target kinerja Sasaran Khusus yang ditetapkan dengan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. Capaian Sasaran Operasional

Sebagai dukungan pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2023 pada Kepala Perangkat Daerah terdapat penyusunan Sasaran Operasional yang mendukung pelaksanaan sasaran sebanyak tiga indikator operasional pada tahun 2023, yang terdiri dari tindak lanjut arahan Gubernur, penyelesaian aduan masyarakat, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK. Indikator operasional menjadi bagian dari Pengolahan e-kinerja dalam capaian penerimaan TPP pada Kepala Perangkat Daerah. Adapun capaian dan realisasi indikator Khusus Tahun 2023 pada Kota Administrasi Jakarta Barat, sebagai berikut :

Tabel 31
Indikator Operasional Tahun 2023 Kota Adm Jakarta Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target	Realisasi	Keterangan
Sasaran Operasional						
1	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubenur	e-Kinerja	100%	100%	Tindak Lanjut Arahan Gubernur ditindak lanjuti
2	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	100%	Penyelesaian Aduan Masyarakat melalui aplikasi CRM dengan total aduan 8.004 Aduan dan terselesaikan
3	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil	e-Kinerja	100%	100%	Pelaksanaan tindak lanjut tercapai setiap triwulan dan terealisasi 100%

Capaian Sasaran Operasional Tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan kesepakatan perjanjian kinerja. Pada pelaksanaan indikator Tindak Lanjut arahan Gubernur telah terselesaikan sebanyak 8 Arahan yang diselesaikan dan dilaporkan kembali kepada Provinsi DKI Jakarta dengan capaian terselesaikan 100%. Pada Indikator penanganan aduan masyarakat sepanjang Tahun 2023 terdapat 8.004 aduan Masyarakat yang ditindak lanjuti dengan capaian terselesaikan 100%. Pada indikator Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) telah terselesaikan dengan pelaksanaan capaian 100% pada setiap triwulan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat.

Adapun pelaksanaan indikator operasional mencapai Persentase pemenuhan target yang telah ditetapkan untuk Kota Administrasi Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta dengan Capaian rata-rata 100%. Secara terperinci dibandingkan dengan capaian setiap tahun maka pecapaian dapat digambarkan pada tabel :

Tabel 32
Perbandingan Indikator Operasional
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023

No	Indikator Khusus	2020	2021	2022	2023	Capaian	Keterangan
1	Arahan Gubernur	100%	100%	100%	100%	100,00%	Terealisasi
2	TL Aduan Masyarakat	99.70%	99.96%	100%	100%	100,00%	Terselesaikan
3	SKM	93	94.8	-	-	-	-
4	TLHP BPK	100%	100%	100%	100%	100,00%	Terselesaikan

Hasil pelaksanaan Indikator Operasional pada pelaksanaan dalam penanganan sepanjang Tahun 2023 menjadi kinerja keras Aparatur Sipil Negara Kota Administrasi Jakarta Barat dalam bergerak cepat, tepat dan akurat dalam penyelesaian permasalahan yang dilaporkan. Berdasarkan hasil evaluasi tabel dan capaian, terdapat beberapa hal yang menjadi dukungan pada sasaran operasional Tahun 2023 dengan capaian angka rata-rata 100 %, antara lain :

1. Penanganan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat dilaksanakan sesuai SOP dan tepat sasaran dengan kualitas baik dan memuaskan.
2. Dukungan stakeholder 4 Pilar dalam mendukung rencana kinerja serta realisasi di lapangan mencapai hasil kolaboratif yang memuaskan.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam memastikan penyelesaian hambatan dan kendala pelaksanaan capaian sasaran operasional yang dilaksanakan setiap bulan pada Tahun 2023.

Kota Administrasi Jakarta Barat telah berupaya secara maksimal dalam mewujudkan target kinerja Sasaran Operasioal yang ditetapkan dengan didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang baik dari unit kerja perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Kinerja (performance) adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan hasil kerja dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Presentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik dukungan pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2023.

Tabel 33
Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				2023		Capaian
			2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	
1	Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	-	-	-	-	86,75	92,33	106,43
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	84,06	88,01	88,01	90,62	88,5	94,91	107,24%
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	-	-	-	-	85%	89,76%	105,59%

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kota Administrasi Jakarta Barat terealisasi dengan baik dan mencapai kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2021. Keberhasilan ini merupakan kebanggaan jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan komitmen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Keberhasilan adalah tingkat prestasi atau hasil nyata yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang

telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Keberhasilan tercapainya target yang telah ditetapkan dengan pengukuran yang sesuai serta kriteria yang telah tercapai. Penjelasan bagaimana pelaksanaan analisa :

- **KEBERHASILAN**

Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam penerapan indikator layanan kegiatan kemasyarakatan membutuhkan manajemen, atau tatanan tindakan sebagai langkah-langkah strategik agar target yang diharapkan tersebut tercapai. Dengan demikian manajemen yang baik akan pendukung dalam pelaksanaan capaian target sasaran menjadi sangat penting. Manajemen yang baik menjadi dukungan dalam capaian yang baik dengan didukung keberhasilan. Dalam kerangka mencapai suatu keberhasilan, disyaratkan adanya keterampilan manajemen yang sesuai dengan target, sasaran dan tujuan yang diharapkan. Tidak terpenuhinya tiga hal tersebut, dapat dipastikan bakal mengakibatkan kegagalan. Keberhasilan yang terjadi dalam kinerja disebabkan:

- 1) Adanya sistem, mekanisme dan prosedur serta persyaratan yang dibangun dalam memberikan pelayanan sangatlah mudah dan tidak butuh waktu lama dalam menindaklanjuti setiap warga yang membutuhkan pelayanan.
- 2) Adanya pemahaman masyarakat dalam prosedur permohonan setiap pelayanan di Kantor Kelurahan, sehingga masyarakat mudah dalam mendapatkan pelayanan.

- 3) Cepat tanggapnya pemerintah dalam merespon pengaduan.
- 4) Pemerintah pada saat melakukan penertiban menjalankan sesuai SOP dengan cara humanis.
- 5) Adanya kolaborasi pada semua *stakeholder* seluruh unsur aparatur Kota Administrasi Jakarta Barat..
- 6) Perilaku petugas sopan dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan apa yang dikerjakan para petugas dirasa sudah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
- 7) Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas ditindaklanjuti dengan baik.
- 8) Semua kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, tepat sasaran, cepat dan akurat.
- 9) Semua pelayanan gratis, bila ada pelayanan berbayar sesuai dengan tabel retribusi.
- 10) Telah dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala.

- **Faktor Kegagalan dikarenakan HAMBATAN**

Pada pelaksanaan pencapaian indikator kinerja dalam pelaksanaan capaian terdapat ketidaksesuaian suatu target atau tujuan yang ingin dicapai dengan kendala hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pada tahun 2023. Pelaksanaan monitor dan evaluasi memonitor pelaksanaan, memperbaiki capaian kinerja sesuai pencapaian target, meminimalisir resiko, dan memberikan penyelesaian bila terdapat hambatan yang terjadi. Hambatan yang

terjadi dan dapat teratasi dalam capaian kinerja tahun 2023 disebabkan:

- 1) Penanganan lokasi yang sangat luas dan pengendalian yang berpotensi tidak terukur.
- 2) Laporan menggunakan CRM yang susah diidentifikasi , pelaporan tidak jelas, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Pelayanan warga yang masih minta pengurusan melalui biro jasa lainnya dan tidak mengurus sendiri sehingga terjadi penyampaian informasi yang tidak akurat. Seperti pelayanan Gratis menjadi berbayar.
- 4) Kondisi cuaca ekstrem yang mengakibatkan sarana dan prasarana terdampak untuk diperbaiki.
- 5) Perubahan dan pergeseran anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang anggarannya ditiadakan.
- 6) Realisasi penggunaan anggaran yang belum maksimal sehingga penyerapan tidak sesuai target pada beberapa kelurahan.

- **Langkah-langkah TINDAK LANJUT**

Dalam pelaksanaan pencapaian Indikator strategis perlu dilakukan tindak lanjut dalam penanganan potensi hambatan, Adapun Langkah-langkah tindak lanjut yaitu :

- 1) Sumber Daya Manusia yang mumpuni, yang cukup, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki petugas sangat berdampak pada cepatnya waktu penyelesaian pelayanan sesuai SOP.

- 2) Seluruh pelayanan yang diberikan untuk masyarakat bersifat gratis (tidak dipungut bayaran) hal ini sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak ada pungutan liar.
- 3) Untuk pelayanan pada prinsipnya sudah melakukan prinsip pelayanan prima yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional serta partisipatif.
- 4) Kejelasan tupoksi petugas pelayanan, mengetahui tupoksinya masing-masing dan sudah adanya penetapan.
- 5) Adanya pembinaan kepada petugas secara rutin dan diadakan evaluasi kinerja petugas.
- 6) Dalam melaksanakan pekerjaan petugas pelayanan secara rutin harus dilaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja yang akan menentukan apakah yang bersangkutan akan diperpanjang kontraknya ataupun dihentikan.
- 7) Diterapkan kedisiplinan dan tanggung jawab.
- 8) Sarana prasarana yang digunakan petugas berfungsi dengan baik.
- 9) Penanganan pengaduan terhadap perilaku dan kinerja petugas segera ditindaklanjuti dengan baik.
- 10) Pada saat kejadian ketertiban umum, dalam tindak lanjutnya harus dilakukan sesuai dengan SOP, dalam penanganannya harus dilakukan beberapa tahap.
- 11) Melakukan supervisi dan monev pada setiap bulan agar penyesuaian tidak terdampak pada target tidak tercapai.

- 12) Pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi secara berkala agar capaian setiap bulan dan akhir tahun dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
- 13) Perlu ada dukungan perencanaan dan pengawasan bersama secara berkala dan berkelanjutan dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- 14) Penyelenggaraan pertemuan rutin UKPD di bawah koordinasi para asisten secara berkala sehingga memudahkan koordinasi pelaksanaan program kerja dan pemecahan masalah yang terjadi lintas UKPD, tingkatkan peran asistensi kepada UKPD;
- 15) Peningkatan efektivitas rapat-rapat koordinasi antara UKPD yang kegiatannya saling bersinggungan sehingga tercapai output yg maksimal dari kegiatan;

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas penggunaan sumber daya adalah menerangkan bahwa dalam penyelenggaraan perjanjian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dibutuhkan Analisa Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Capaian Realisasi Anggaran, dukungan stakeholder dan mewujudkan capaian yang diharapkan.

1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Formasi pegawai yang ada di Kota Administrasi Jakarta Barat, pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 34
Tabel Analisis Sumber Daya
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023

	Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/ Kelebihan	Tindak Lanjut
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)				
Jenis Jabatan Struktural:	ABK	Eksisting	Selisih +/-	
Eselon II	3	3	0	
Eselon III	35	35	0	
Kelompok	0	0	0	
Eselon IV	334	315	-19	
Subkelompok	18	18	0	
Jabatan Pelaksana:				
Satuan Pelaksana	0	0	0	
Teknis Ahli	138	155	17	
Teknis Terampil	359	26	-333	
Administrasi Ahli	0	0	0	
Administrasi Terampil	0	30	-30	
Operasional Ahli	0	0	0	
Operasional Terampil	0	0	0	
Pelayanan Ahli	0	1	1	
Pelayanan Terampil	0	4	4	
Mutasi Pegawai	0	0	0	
Pegawai Tugas Belajar	0	0	0	
CPNS	0	0	0	

Jabatan Fungsional:				
Analisis Kebijakan Ahli Madya	5	0	-5	
Perencana Ahli Madya	1	0	-1	
Analisis Hukum Ahli Madya	1	0	-1	
Analisis SDM Ahli Madya	1	0	-1	
Perencana Ahli Muda	1	0	-1	
Pustakawan Ahli Muda	1	0	-1	
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	26	0	-26	
Analisis Hukum Ahli Pertama	5	0	-5	
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	1	0	-1	
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	2	0	-2	
Perencana Ahli Pertama	3	0	-3	
Pustakawan Ahli Pertama	1	0	-1	
Arsiparis Ahli Madya	10	0	-10	
Arsiparis Ahli Muda	2	2	0	
Arsiparis Ahli Pertama	2	0	-2	
Pranata SDM Aparatur Penyelia	1	0	-1	
Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0	-8	
Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	56	0	-56	
Total Pegawai	1.013	589	-424	Permintaan penambahan pegawai ke BKD Prov. DKI

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Tingkat Kota Administrasi Barat melakukan pengukuran efisiensi rincian output program menggunakan rumus sebagai berikut :

1) Efisiensi Rincian Output (RO) :

$$ERO = \frac{\sum_{i=1}^n (AARO_i \times CRO_i) - RARO_i}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

$$-20\% \leq ERO \leq 20\%$$

2) Nilai Efisiensi :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Perhitungan Efisiensi Rincian Output (RO) dan Nilai Efisien,
dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 35
Perhitungan Efisiensi Rincian Output (RO) dan Nilai Efisiensi

No.	RO	RVRO/TVRO	Alokasi Anggaran KRO (AAKRO)	Realisasi Anggaran KRO (RAKRO)	AAKRO x (RVRO/TVRO)	(AAKRO x (RVRO/TVRO)) - RAKRO	Efisiensi
1	Program Pengelolaan Kecamatan	100,00%	508.555.861.412	502.792.469.844	508.555.861.412	5.763.391.568	4,80%
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100,00%	104.887.118.519	98.131.724.793	104.887.118.519	6.755.393.726	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100,00%	2.755.405.821	2.499.790.066	2.755.405.821	255.615.755	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	105,32%	375.316.913.459	360.596.636.689	395.289.918.795	34.693.282.106	
5	Program Pengelolaan Kota Administrasi	105,60%	2.370.287.557	2.290.139.660	2.502.930.708	212.791.048	
Total			993.885.586.768	966.310.761.052	1.013.991.235.255	47.680.474.203	
Nilai Efisiensi							61,99%

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, nilai efisiensi Rincian Output tingkat KRO adalah sebesar 4,8% dengan Nilai Efisiensi 61,99%.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah dicapai pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses penilaian capaian pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan kepuasan pada masyarakat Jakarta Barat dengan perbandingan hasil kerja dengan target dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Adapun perbandingan dapat diukur dengan capaian kinerja wilayah Kota Administrasi lainnya ataupun sejenis.

Perbandingan capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan sejalan dengan capaian perbandingan lainnya. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja utama yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan" pada Kota Administrasi Jakarta Barat. Pengukuran perbandingan kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk capaian nilai akhir yang dicapai rata-rata pada tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dengan pengumpulan data berjenjang dari Kelurahan, Kecamatan, dan Kota. Perbandingan pencapaian dibandingkan

dengan pencapaian pada tingkat sejenis.

Perbandingan capaian IKU pada Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2023 dilakukan perbandingan pada Kota dan Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta pada indikator kepuasan masyarakat. Selain itu, indikator kepuasan masyarakat dibandingkan dengan Kota Banjarmasin dan Kota Bandung.

Tabel 36
Perbandingan Nilai IKM
Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta						Kota/Kabupaten	
		Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Kepulauan Seribu	Banjarmasin	Bandung
Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	94,91	97,52	96,28	93,74	93,05	91,29	91,12	90,20

Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis, Kota Administrasi Jakarta Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 993.885.586.768,00. Dari total alokasi anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis, sebesar Rp 332.181.889.963,00 dikelola Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat, sedangkan selebihnya sebesar Rp 661.703.696.805,00 terbagi dalam 8 (delapan) kecamatan dan 56 (lima puluh enam) kelurahan.

Target, realisasi, dan capaian dari masing-masing program pendukung sasaran strategis Perjanjian Kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2023 sesuai data Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Provinsi DKI Jakarta, terdata sebagai berikut :

Tabel 37
Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Program	Indikator Program	Target Keuangan	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	508.555.861.412	502.792.469.844	98,87%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU			
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	104.887.118.519	98.131.724.793	93,56%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	2.755.405.821	2.499.790.066	90,72%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kota Administrasi dalam Kondisi Baik	375.316.913.459	360.596.636.689	96,08%

No	Program	Indikator Program	Target Keuangan	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (Rp)
		Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
5	PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	2.370.287.557	2.290.139.660	96,62%
Jumlah			993.885.586.768	966.310.761.052	97,23%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat dalam upaya mencapai tujuan dengan mewujudkan sasaran-sasaran strategis melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan dalam rencana strategis telah terselenggara dengan baik. Dengan capaian sebesar 97,23%, seluruh indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan telah dapat menghasilkan outcome dan output yang diharapkan.

Adapun perbandingan target dan realisasi anggaran antara tahun 2019 – tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 38
Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja
Tahun 2019 – Tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	642.010.113.193	606.254.115.844	94,43%
2020	598.595.368.040	582.297.289.114	97,28%
2021	922.131.601.245	886.543.531.266	96,14%
2022	975.893.809.519	939.785.306.950	96,30%
2023	966.310.761.052	993.885.586.768	97,23%

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa capaian kinerja anggaran Kota Administrasi Jakarta Barat mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar pencapaian sasaran strategis maupun pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya dapat terselenggara dengan lebih baik,

Adanya sisa realisasi anggaran untuk menjadi perhatian pada tahun berikutnya yang akan dilakukan pada anggaran perubahan atau pergeseran tahun 2023 antara lain, adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya :

1. Kebijakan pergeseran serta efisiensi anggaran yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan tidak memperoleh dukungan anggaran menuntut inovasi dan kreatifitas dari seluruh aparat dan jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat dalam mewujudkan kinerja, outcome dan output yang diharapkan.
2. Adanya kendala keterlambatan penerbitan Surat Penyediaan Dana yang menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa koordinasi dan kerja sama yang baik antara Kota Administrasi Jakarta Barat dengan unit kerja perangkat daerah perlu dipertahankan sehingga dapat tercipta pola hubungan kerja yang baik antara jajaran Kota Administrasi Jakarta Barat dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Situasi dan kondisi pasca pandemi Covid-19 mengharuskan seluruh pegawai untuk sigap dan tanggap dalam mengantisipasi berbagai perubahan keadaan serta senantiasa meningkatkan kapabilitas terutama untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Pelaksanaan realisasi anggaran dan fisik yang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap bulannya dalam mencapai target realisasi yang baik dan sesuai capaian.

Tabel 39
Realisasi Anggaran pada PD/UKPD pada Tahun 2023

NO.	NAMA PD/UKPD	APBD PERUBAHAN TAHUN 2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	SETKO ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	332.181.889.963	332.181.889.963	322.701.065.947	97,15%
2	KECAMATAN KEBON JERUK - JAKBAR	1.945.598.744	1.945.598.744	1.866.542.030	95,94%
3	KELURAHAN SUKABUMI SELATAN - JAKBAR	9.143.346.008	9.143.346.008	8.911.947.931	97,47%
4	KELURAHAN SUKABUMI UTARA - JAKBAR	9.791.876.093	9.791.876.093	9.613.923.157	98,18%
5	KELURAHAN KELAPA DUA - JAKBAR	8.398.447.927	8.398.447.927	8.195.360.569	97,58%
6	KELURAHAN DURI KEPA - JAKBAR	13.394.257.983	13.394.257.983	13.102.880.962	97,82%
7	KELURAHAN KEDOYA UTARA - JAKBAR	14.043.178.711	14.043.178.711	13.489.122.714	96,05%
8	KELURAHAN KEBON JERUK - JAKBAR	14.152.461.958	14.152.461.958	13.937.610.771	98,48%
9	KELURAHAN KEDOYA SELATAN - JAKBAR	10.461.325.347	10.461.325.347	10.256.108.365	98,04%
10	KECAMATAN KEMBANGAN - JAKBAR	1.931.051.369	1.931.051.369	1.900.464.602	98,42%
11	KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN - JAKBAR	13.727.068.938	13.727.068.938	13.428.033.230	97,82%
12	KELURAHAN MERUYA UTARA - JAKBAR	15.203.359.272	15.203.359.272	14.889.087.334	97,93%
13	KELURAHAN MERUYA SELATAN - JAKBAR	12.998.822.494	12.998.822.494	12.601.221.286	96,94%
14	KELURAHAN SRENGSENG - JAKBAR	11.972.747.989	11.972.747.989	11.731.990.466	97,99%

NO.	NAMA PD/UKPD	APBD PERUBAHAN TAHUN 2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
15	KELURAHAN JOGLO - JAKBAR	12.412.109.026	12.412.109.026	12.171.165.797	98,06%
16	KELURAHAN KEMBANGAN UTARA - JAKBAR	12.809.626.586	12.809.626.586	12.487.078.186	97,48%
17	KECAMATAN CENGKARENG - JAKBAR	2.316.160.198	2.316.160.198	2.080.643.219	89,83%
18	KELURAHAN CENGKARENG BARAT - JAKBAR	18.182.276.241	18.182.276.241	17.484.020.201	96,16%
19	KELURAHAN CENGKARENG TIMUR - JAKBAR	19.581.996.252	19.581.996.252	19.129.692.442	97,69%
20	KELURAHAN KAPUK - JAKBAR	18.137.703.713	18.137.703.713	17.877.939.333	98,57%
21	KELURAHAN DURI KOSAMBI - JAKBAR	15.115.976.482	15.115.976.482	14.497.277.075	95,91%
22	KELURAHAN RAWA BUAYA - JAKBAR	16.404.822.636	16.404.822.636	15.935.432.815	97,14%
23	KELURAHAN KEDAUNG KALI ANGKE - JAKBAR	12.165.308.926	12.165.308.926	11.817.696.556	97,14%
24	KECAMATAN KALIDERES - JAKBAR	2.099.480.859	2.099.480.859	1.983.080.700	94,46%
25	KELURAHAN KAMAL - JAKBAR	12.294.360.708	12.294.360.708	12.034.448.625	97,89%
26	KELURAHAN TEGAL ALUR - JAKBAR	16.713.467.547	16.713.467.547	16.023.337.471	95,87%
27	KELURAHAN PEGADUNGAN - JAKBAR	17.378.528.795	17.378.528.795	17.042.255.827	98,07%
28	KELURAHAN KALIDERES - JAKBAR	16.859.118.608	16.859.118.608	16.328.784.523	96,85%
29	KELURAHAN SEMANAN - JAKBAR	12.702.834.126	12.702.834.126	12.214.679.600	96,16%
30	KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN - JAKBAR	2.131.189.822	2.131.189.822	2.068.006.019	97,04%
31	KELURAHAN TOMANG - JAKBAR	14.533.821.068	14.533.821.068	14.282.791.785	98,27%
32	KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA - JAKBAR	9.819.940.614	9.819.940.614	9.599.705.731	97,76%
33	KELURAHAN GROGOL - JAKBAR	9.876.298.772	9.876.298.772	9.626.575.116	97,47%
34	KELURAHAN JELAMBAR - JAKBAR	11.469.714.359	11.469.714.359	11.102.765.788	96,80%
35	KELURAHAN JELAMBAR BARU - JAKBAR	11.691.743.576	11.691.743.576	11.353.047.519	97,10%
36	KELURAHAN WIJAYA KUSUMA - JAKBAR	11.964.562.072	11.964.562.072	11.697.147.641	97,76%
37	KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN - JAKBAR	9.435.943.655	9.435.943.655	9.271.755.524	98,26%
38	KECAMATAN PALMERAH - JAKBAR	1.937.325.687	1.937.325.687	1.871.632.241	96,61%

NO.	NAMA PD/UKPD	APBD PERUBAHAN TAHUN 2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
39	KELURAHAN PALMERAH - JAKBAR	15.133.383.509	15.133.383.509	14.668.613.596	96,93%
40	KELURAHAN KEMANGGISAN - JAKBAR	11.635.958.144	11.635.958.144	11.618.925.089	99,85%
41	KELURAHAN SLIPI - JAKBAR	8.418.559.551	8.418.559.551	8.070.245.417	95,86%
42	KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR	9.446.901.366	9.446.901.366	9.108.358.448	96,42%
43	KELURAHAN JATI PULO - JAKBAR	11.566.972.209	11.566.972.209	11.146.197.660	96,36%
44	KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN - JAKBAR	9.066.333.103	9.066.333.103	8.759.731.999	96,62%
45	KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR	1.860.491.788	1.860.491.788	1.753.911.163	94,27%
46	KELURAHAN KALI ANYAR - JAKBAR	8.366.761.572	8.366.761.572	8.215.835.507	98,20%
47	KELURAHAN DURI UTARA - JAKBAR	8.138.481.460	8.138.481.460	7.918.839.493	97,30%
48	KELURAHAN TANAH SEREAL - JAKBAR	11.599.432.037	11.599.432.037	11.247.858.051	96,97%
49	KELURAHAN KRENDANG - JAKBAR	8.734.255.203	8.734.255.203	8.555.373.105	97,95%
50	KELURAHAN JEMBATAN BESI - JAKBAR	9.442.852.708	9.442.852.708	9.213.338.783	97,57%
51	KELURAHAN ANGKE - JAKBAR	11.540.662.943	11.540.662.943	11.194.660.340	97,00%
52	KELURAHAN JEMBATAN LIMA - JAKBAR	8.684.923.784	8.684.923.784	8.463.127.409	97,45%
53	KELURAHAN DURI SELATAN - JAKBAR	7.339.669.079	7.339.669.079	7.117.756.935	96,98%
54	KELURAHAN TAMBORA - JAKBAR	7.195.735.856	7.195.735.856	7.005.971.329	97,36%
55	KELURAHAN PEKOJAN - JAKBAR	9.935.091.285	9.935.091.285	9.754.582.251	98,18%
56	KELURAHAN ROA MALAKA - JAKBAR	6.726.158.027	6.726.158.027	6.324.156.929	94,02%
57	KECAMATAN TAMAN SARI - JAKBAR	1.663.525.329	1.663.525.329	1.600.616.745	96,22%
58	KELURAHAN KRUKUT - JAKBAR	9.117.972.233	9.117.972.233	8.750.682.692	95,97%
59	KELURAHAN MAPHAR - JAKBAR	9.129.600.907	9.129.600.907	8.933.537.450	97,85%
60	KELURAHAN TAMAN SARI - JAKBAR	8.501.311.393	8.501.311.393	8.358.166.270	98,32%
61	KELURAHAN TANGKI - JAKBAR	8.070.374.968	8.070.374.968	7.785.250.462	96,47%
62	KELURAHAN MANGGA BESAR - JAKBAR	7.015.619.792	7.015.619.792	6.734.761.855	96,00%

NO.	NAMA PD/UKPD	APBD PERUBAHAN TAHUN 2023	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
63	KELURAHAN KEAGUNGAN - JAKBAR	9.547.256.425	9.547.256.425	9.397.438.753	98,43%
64	KELURAHAN GLODOK - JAKBAR	7.579.280.403	7.579.280.403	7.339.558.072	96,84%
65	KELURAHAN PINANGSIA - JAKBAR	11.048.278.570	11.048.278.570	10.666.946.151	96,55%
TOTAL			993.885.586.768	966.310.761.052	97,23%

Seiring dengan beralihnya kondisi pandemi Covid-19 menjadi endemi, berbagai penilaian atau perlombaan baik tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi sebagian besar mulai diselenggarakan pada tahun 2023. Pelaksanaan Inovasi, keberlanjutan, dan kolaborasi dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan mengajak para *stakeholders*.

Bersama jajaran menjadi kolaborator setiap aksi kolaborasi pada setiap pelaksanaan kegiatan di seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Terdapat prestasi atau penghargaan yang berhasil diraih Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai salah satu bukti nyata dari upaya yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada level Nasional, Pemerintah Provinsi, dan antar wilayah Kota Administrasi.





BAB 4

Penutup

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, nilai capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat adalah 106,42%, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Dukungan pada Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2023 sebanyak 4 KSD Tahun 2023 dengan pelaksanaan Rencana Aksi sebanyak 25 Renaksi dengan capaian 100 %. Terdapat Sasaran Khusus dan Operasional pada pelaksanaan perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun pada Tahun 2023 capaian rata-rata Sasaran Khusus sebesar 104,6 % dan Sasaran Operasional sebesar 100 %.

Peningkatan capaian ini merupakan hasil kerja bersama jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung penerapan Nilai-nilai Budaya Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan Kota Administrasi Jakarta Barat Terbaik Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya

kepastian hukum, kesetaraan, efektif, dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol serta partisipasi kolaborasi dari masyarakat Kota Jakarta Barat. .



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UUS KUSWANTO
Jabatan : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

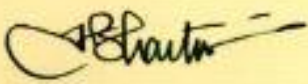
Nama : HERU BUDI HARTONO
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA, Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  HERU BUDI HARTONO	PIHAK PERTAMA, Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,  UUS KUSWANTO NIP 197301211893031004
---	--

LKIP Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Uus Kurniawanto
NIP : 197301211993031004
Jabatan : Walikota
Unit Kerja : Kota Administrasi Jakarta Barat

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Tercapainya Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kota Pengagungan dan Jasa, Berbudaya serta Berwawasan Lingkungan yang Memberikan Layanan Publik dan Pemertaan Hasil Pembangunan Optimal	1	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN/RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan hasil indeks kepuasan koordinasi kotakabupaten administrasi. METODE PENGUKURAN : Formulasi Pengukuran Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kotakabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	86,75	N/A	86,75	86,75	N/A
		2	Indeks Kepuasan Layanan Kota Administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN/RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan layanan kota administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dan hasil indeks kepuasan koordinasi kotakabupaten administrasi. METODE PENGUKURAN : Formulasi Pengukuran Hasil diperoleh dengan cara rata-rata dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, dan hasil indeks kepuasan koordinasi kotakabupaten administrasi dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Efektifitas Koordinasi yang dilakukan melalui Jaksurvei	N/A	85,75	N/A	86,75	86,75	N/A
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat yang Optimal	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN/RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survey	N/A	88,5	N/A	88,5	88,5	N/A

					kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Dengan Berbasis Keluarga (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengawasan Juru Pemantau Jarak (Jumartik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). METODE PENGUKURAN : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 54,95; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,56, atau nilai interval konversi 55,00 – 75,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 75,61 – 85,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 85,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survey yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM). Hasil diperoleh dengan cara survei Indeks Kepuasan Masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan. SUMBER DATA : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei						
		2	Indeks Efektifitas Koordinasi Kota administrasi	e-SAKIP	DASAR HUKUM : Peraturan Menteri PAN/RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DEFINISI : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. METODE PENGUKURAN : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kota/Kabupaten Administrasi didapatkan melalui rata-rata hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi UKPD pada rumpun pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi. SUMBER DATA : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survey Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei	N/A	85	N/A	85	85	N/A
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Kinerja Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pamprow DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pamprow DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen
4	Berkembangnya Keterampilan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	N/A	100	100	100	100	Persen

LKIP Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023

5	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembangan UMKM	N/A	N/A	100	100	100	Persen
6	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Peningkatan kualitas kawasan yang dikondisikan oleh Walikota/Bupati	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penataan kawasan yang dikondisikan oleh Walikota/Bupati	100	100	100	100	100	Persen
7	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman	N/A	100	N/A	100	100	Persen
8	Tercapainya Perubahan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen
9	Tercapainya Perubahan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pengakapnya	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pengakapnya	N/A	100	N/A	N/A	100	Persen
Sasaran Khusus											
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah penerap DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keadaan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat
11	Meningkatnya Pemastian E-Purchasing dalam Pengisian Barang dan Jasa	1	Persentase Pemastian E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan mesin minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galor, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen

12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Parangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategis komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase terwujudnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Parangkat Daerah. b) Persentase terwujudnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase terwujudnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivitas luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivitas luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Parangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	N/A/Predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Parangkat Daerah oleh Inspektoriat (Intak 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
14	Meningkatnya Pengelolaan Anasir pada Perangkat Daerah	1	Persentase Anasir Aktif dalam Daftar Anasir Aktif	e-Kinerja	Definisi : Terselenggaranya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Keasipan (UK). Pengolahan Anasir Dinamis Parangkat Daerah masuk dalam Sacaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target korups Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas dan Seluruh Eselon II/Sejarah. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada penerima anasir yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua anasir yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anasir di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (kecuali Seluruh UPT) Unit Keasipan adalah satuan kerja pada penerima anasir yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan keasipan. Unit Keasipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektur/Badan/Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja Walikota/Bupati, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat/Biro Umum. Dasar Hukum: 1. Permangan-RB Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengawasan Keasipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Anasir Dinamis Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Keasipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengolah (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kal 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urutannya dan ditandatangani ke Dinas Perhubungan dan Keasipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditandatangani ke Dinas Perhubungan dan Keasipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urutannya. Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembentukan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembentukan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d. Desember. TW IV : Pembentukan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d. Desember	N/A	100%	100%	100%	100%	Persentase
15	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progres pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan	e-Kinerja	Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal nilai yang telah ditetapkan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produser data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal nilai berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

				Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Formula Pengukuran : $\frac{[(\text{Jumlah data terkumpul ke walidata}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut})] \times 100\%}{\text{Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal ini}}$ Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)							
16	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	1	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	e-Kinerja Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Survei Gubernur No. 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi : Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana tercantum dalam Survei Gubernur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing Formulasi Pengukuran : Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei	92	N/A	92	N/A	92	N/A	
17	Terkecilnya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kusa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PDUKPD	e-Kinerja Definisi : Cetakan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PDUKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengadani. BMD yang sedang diinventarisasi adalah : 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. Penghitungan : 1. Persiapan 10% a. Bobot 5% PDUKPD menyusun SK Tim /Survei Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5% PDUKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 70% a. Bobot 75% PDUKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% a. Bobot 5% PDUKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5% PDUKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5% PDUKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	N/A	10%	50%	100%	100%	Persentase	
18	Terselenggaranya pendataan dan inventarisasi tanah bidang pembangunan di dalam sistem informasi Jakarta Satu	1	Persentase penyelesaian pengumpulan data konsolidasi hasil kewajiban fasos tesam dari pemegang SHPT/PT/UPPR yang terintegrasi dengan JAKARTA SATU	e-Kinerja Jumlah BAST (Berita Acara Serah Terima) Tahun 2017-2022 yang selesai diinput dibagi jumlah target BAST dikali 100% Target Kapasitas Seribu : 1 BAST Kota Administrasi Jakarta Utara : 70 BAST Kota Administrasi Jakarta Barat : 115 BAST Kota Administrasi Jakarta Pusat : 45 BAST Kota Administrasi Jakarta Timur : 42 BAST Kota Administrasi Jakarta Selatan : 126 BAST Dasar Hukum : Perpu Nomor 12 Tahun 2020	N/A	15%	30%	100%	100%	Persentase	

19	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dan hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk barang-baru dan perakayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Formula Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah)}}{\text{Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) PDN Keamanan Dalam Negeri}} \times 100\%$ Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) PDN Keamanan Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyusutkan Gersakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase
20	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per tahun	1	Persentase implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. DEFINISI : Terselenggaranya Penuaan pengembangan kompetensi 20 JP per tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Formula Pengukuran : $\frac{[(\text{Jumlah data yang terkumpul ke walidata}) / (\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4})] \times 100\%}{\text{Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) PDN Keamanan Dalam Negeri}} \times 100\%$ Sumber Data : Simdiklat BPSDM	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
21	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. DEFINISI : Terselenggaranya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4). SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase

22	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum: 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi Operasional: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (SI-Perisa). 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah. 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. Masing-masing Tahapan diuraikan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko. Formula Pengukuran: (Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektoral) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4) x 100% Output Sasaran: 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko. Metode Pengukuran: Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektoral: Triwulan II: 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal Triwulan III: 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko Triwulan IV: 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektoral	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase
23	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195: "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi Operasional: Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keakuannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data: e-SAKIP 2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data: ProyekSI APBD proyeksiapbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terrealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data: a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyekSI APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyekSI APBD. 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperlakukan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data: proyekSI APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bkk = 43,5% BE = 28,6% Bp - Bobot penyerapan anggaran BK - Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bkk - Bobot capaian keluaran BE - Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan: ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = Cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen

					Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keakuannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e-SAKIP 2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : ProyekSI APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terrealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyekSI APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyekSI APBD. 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperlakukan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyekSI APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bkk = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bkk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						
Sasaran Operasional											
24	Tercapainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
25	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen

25	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persen
----	--	---	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	------	--------

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2023
Wakil Kota Administrasi Jakarta Barat,



Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004

**PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DIRAIH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2023**

Unit Kerja Terkait	Prestasi		Tingkat	Unit/Organisasi Yang Mengeluarkan Penghargaan	Keterangan	Dokumentasi
Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	Juara II Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXX Tahun 2023	Provinsi DKI Jakarta	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi DKI Jakarta		
	2	Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Nindya	Nasional	Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)		
	3	Cakupan Ke-2 Tertinggi Imunisasi Dasar Lengkap Tingkat Nasional	Nasional	Kementerian Kesehatan		
	4	Kota Layak Anak kategori Nindya	Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)		
	5	Anugerah Dwija Praja Nugraha	Nasional	Pengurus Besar PGRI		

Bagian Hukum	5	Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan	Nasional	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia		
	6	Kota Peduli HAM Kota Administrasi Jakarta Barat	Nasional	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia		
Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	7	Penghargaan Capaian Nilai Tertinggi Penagihan Fasos dan Fasum Triwulan III dan IV Tahun 2023	Prov.DKI Jakarta	Pj. Gubernur DKI Jakarta		
Kecamatan Cengkareng	8	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kecamatan	Prov.DKI Jakarta	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Badan Publik Informatif	 
Kecamatan Grogol Petamburan	9	Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik"	Nasional	Kementerian PAN dan RB		
Kelurahan Cengkareng Barat	10	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kelurahan	Prov.DKI Jakarta	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Badan Publik Menuju Informatif	

Kelurahan Kebon Jeruk	11	Kelurahan Terbaik Mewakili Kota Jakarta Barat dalam Rangka Kegiatan Penataan Kawasan Terbaik Tingkat Kelurahan Tahun 2023	Prov.DKI Jakarta	Pj. Gubernur DKI Jakarta		
	12	Kampung Iklim Terbaik Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	Prov.DKI Jakarta	Pj. Gubernur DKI Jakarta	RW 06 Kelurahan Kebon Jeruk	
Kelurahan Kembangan Selatan	13	Kelurahan dengan Penataan Kawasan Terbaik di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	Prov.DKI Jakarta	Pj. Gubernur DKI Jakarta	Terbaik	
Kelurahan Palmerah	14	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kelurahan	Prov.DKI Jakarta	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Badan Publik Cukup Informatif	

Kelurahan Kemanggisan	15	Kampung Iklim Terbaik Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	Prov.DKI Jakarta	Pj. Gubernur DKI Jakarta	RW 02 Kelurahan Kemanggisan Jakarta Barat	
Kelurahan Roa Malaka	16	Nominasi Kelurahan dengan Nilai IKM 100% Setiap Triwulan 2022	Prov.DKI Jakarta	Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta		
Kelurahan Keagungan	17	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kelurahan	Prov.DKI Jakarta	Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	Badan Publik Menuju Informatif	
Kelurahan Kelapa Dua	18	Juara 2 Lomba Vlog PKK Pokja 1 Generasi Unggul Tanpa Narkoba (SULTAN)	Nasional	TP PKK Pusat		
	19	Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) RW Terbaik dalam Rangka Apresiasi Masyarakat Peduli Lingkungan	Prov.DKI Jakarta	Pj. Gubernur DKI Jakarta		

**DAFTAR INOVASI DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2023**

No	UKPD	Inovasi	Tahun Inovasi
1	Kelurahan Duri Utara	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Dan Kebersihan Lingkungan Melalui Sistem Informasi Jemput Antar Sampah Berbasis Aplikasi (SIJAS BERDASI) Kelurahan Duri Utara	2023
2	Kelurahan Tamansari	Proyek Perubahan Penataan Lokasi Pedagang Kreatif Lapangan Melalui Pembinaan dan Pemberian Kartu Identitas PKL Diwilayah Kelurahan Tamansari	2023
3	Kelurahan Semanan	Sobat Lurah - Solusi Hebat Konsultasi Pelayanan Kelurahan	2023
4	Kelurahan Kamal	Pemanfaatan Lahan Aset Pemprov DKI (SHP 484) di RW. 08 Kelurahan Kamal sebagai Lahan Budidaya Ikan Air Tawar	2023
5	Kelurahan Roa Malaka	Digitalisasi Pelayanan dan Informasi (KORMA = Kolaborasi Roa Malaka)	2023
6	Kecamatan. Grogol Petamburan	Si RUJAK (Sistem Rencana Umum KerJA Kecamatan) Grogol Petamburan	2023
7	Kelurahan Kebon Jeruk	Eco Enzyme RW 06 Kelurahan Kebon Jeruk	2023

